

MEDIAKEUANGAN

TRANSPARANSI INFORMASI KEBIJAKAN FISKAL

MENJAGA SINAMBUNG HAYAT DESA

Imbas pandemi tak pilih tempat. Desa pun turut meratap. BLT desa segera disalurkan bagi mereka yang berhak, sebagai wujud kesigapan negara menyangga hidup rakyat desa di tengah pandemi.



Daftar Isi



COVER STORY:

Salah satu jaring pengaman sosial dari pemerintah terwujud dalam program BLT desa. Program ini ditujukan bagi keluarga miskin atau tidak mampu di desa sebagai stimulus ekonomi di pedesaan. Bantuan ini direpresentasikan dengan besek bambu yang merupakan wadah tradisional khas dari desa.

MEDIA KEUANGAN adalah majalah resmi Kementerian Keuangan. Memberikan informasi terkini seputar kebijakan fiskal didukung oleh narasumber penting dan kredibel di bidangnya.

MEDIA KEUANGAN saat ini dapat diunduh melalui



App Store



Google Play



Foto Cover:

Resha Aditya Pratama

5 DARI LAPANGAN BANTENG

6 EKSPOSUR

LAPORAN UTAMA

- 8 Benahi Implementasi Raih Faedah Optimal
- 12 Komitmen Kuat Bantu Masyarakat
- 16 Infografik
- 18 Penawar Lara Itu Bernama BLT desa
- 20 Agar Manfaat Sampai Kepada yang Berhak

PHOTO STORY

- 22 Nan Unik Pun Eksotik

TEKA TEKI

- 24 Teka Teki Medkeu

WAWANCARA

- 25 Mereduksi Risiko Bencana

POTRET KANTOR

- 28 Sidang Sonder Perjumpaan

BAGAIMANA CARANYA?

- 31 Alur Komunikasi Di masa Pandemi

PROFESI

- 32 Berkorban demi Memastikan Pelayanan Tetap Berjalan

BUGAR

- 35 *New Normal* di Tempat Kerja, Seperti Apa?

OPINI

- 36 Pelajaran dari Pandemi untuk Potensi Pertumbuhan Ekonomi

UANG KITA BUAT APA

- 38 Tatkala Konektivitas Tak Terbatas

OPINI

- 40 *Excess Profit Tax* sebagai Solusi

GENERASI EMAS

- 42 Dari Desa, karena Desa, Untuk Desa

LOKAL

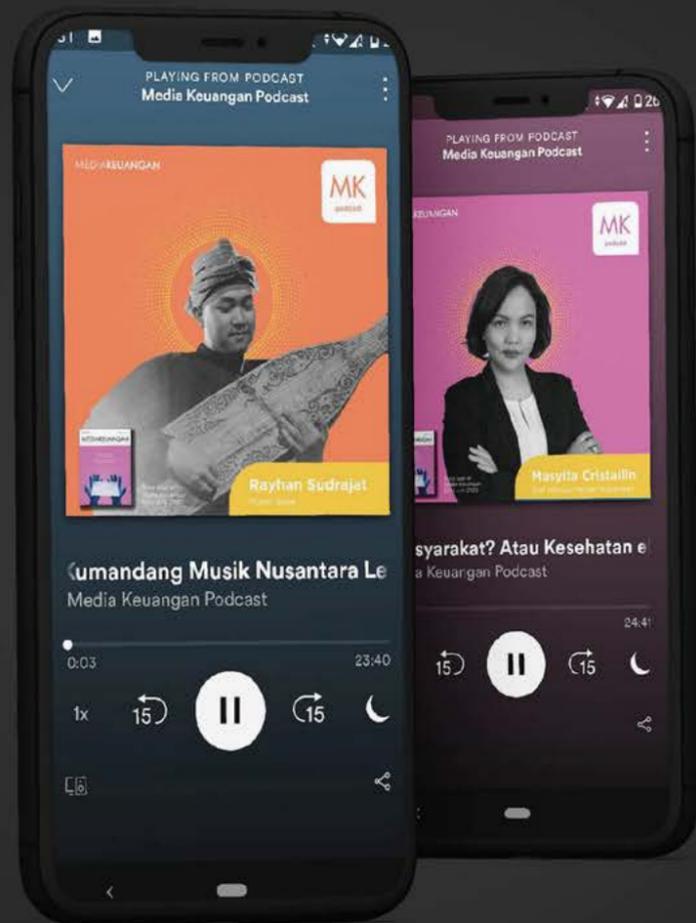
- 44 Berakhir Pekan ke Malin Deman

FINANSIAL

- 46 Perjanjian Pranikah

Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. **Pelindung:** Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. **Pengarah:** Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. **Penanggung Jawab:** Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto. **Pemimpin Umum:** Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Rahayu Puspasari. **Pemimpin Redaksi:** Kabag Manajemen Publikasi, Rahmat Widiana. **Redaktur Pelaksana:** Kasubbag Publikasi Cetak Yani Kurnia A. **Dewan Redaksi:** Ferry Gunawan, Dianita Sulastuti, Titi Susanti, Budi Sulisty, Pilar Wiratoma, Purwo Widiarto, Muchamad Maltazam, Alit Ayu Meinarsari, Teguh Warsito, Hadi Suroho, Budi Prayitno, Budi Sulisty. **Tim Redaksi:** Reni Saptati D.I., Danik Setyowati, Abdul Aziz, Dara Haspramudilla, Dimach Oktaviansyah Karunia Putra, A. Wirananda, CS. Purwowidhu Widayanti, Rostamaji, Adik Tejo Waskito, Arif Nur Rokhman, Ferdian Jati Permana, Andi Abdurrochim, Muhammad Fabhi Riendi, Leila Rizki Niwanda, Kurnia Fitri Anidya, Buana Budianto Putri, Muhammad Irfan, Arimbi Putri, Nur Iman, Berliana, Hega Susilo, Ika Luthfi Alzuhri, Irfan Bayu. **Redaktur Foto:** Anas Nur Huda, Resha Aditya Pratama, Andi Al Hakim, Arief Kuswanadji, Intan Nur Shabrina, Ichsan Atmaja, Megan Nandia, Sugeng Wistriono, Rezky Ramadhani, Arif Taufiq Nugroho. **Desain Grafis dan Layout:** Venggi Obdi Ovisa, Ditto Novenska. **Alamat Redaksi:** Gedung Djuanda 1 Lantai 9, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328/6330. **E-mail:** mediakeuangan@kemenkeu.go.id.

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepiantasnya.



Podcast Media Keuangan

Dengarkan serunya wawancara bersama para narasumber pilihan Media Keuangan

Menjaga Asa dengan BLT desa

Mentari pagi sudah membumbung tinggi. Panas matahari sudah terasa menyengat di kulit. Namun Maryono, buruh lepas harian yang juga salah satu warga Dusun Niron Sleman Yogyakarta, masih harus berdiam di rumah. Sejak pemilik mebel kayu tempat dia bekerja memintanya tak pergi dulu ke toko mebel lantaran permintaan turun, Maryono terpaksa berhenti bekerja. Maryono adalah satu satu dari sekian warga yang terimbas dampak pandemi COVID-19 yang masih melanda negeri ini. Ya, dampak virus yang bermula di Wuhan, China tidak hanya dirasakan oleh warga perkotaan saja. Kenyataannya, masyarakat di pedesaan pun tak luput dari imbas pandemi.

Pemerintah tak berdiam diri. Pemerintah menyadari bahwa situasi pandemi tak hanya mengakibatkan dampak di sektor kesehatan tetapi juga sektor ekonomi dan sosial di semua wilayah Indonesia. Oleh karena itu,

untuk menjaga daya beli masyarakat miskin di desa yang terdampak situasi COVID-19, kebijakan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) desa pun digulirkan. BLT desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari alokasi dana desa. Tujuannya adalah untuk mengurangi dampak ekonomi bagi warga di pedesaan akibat adanya pandemi COVID-19.

Inisiatif pemerintah bahkan tak berhenti di situ. Sesuai instruksi Presiden Joko Widodo pada Rapat Kabinet Terbatas tanggal 18 Mei 2020 agar pemerintah melakukan langkah-langkah percepatan penyaluran BLT desa, Kementerian Keuangan menindaklanjutinya dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020. Melalui peraturan tersebut, dana desa diinstruksikan agar disalurkan lebih cepat dan tidak lagi membatasi persentase penggunaan dana desa untuk penyaluran BLT desa. Hal ini ditujukan semata-mata

agar manfaat BLT desa dapat segera dirasakan warga pedesaan yang terdampak COVID-19.

Tentu saja, agar penyalurannya tepat sasaran penerima BLT desa harus memenuhi beberapa kriteria. Diantaranya, penerima BLT desa bukan merupakan penerima program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, dankartu pra kerja. Selain itu, kelancaran program BLT desa tak lepas dari dukungan pemerintah daerah, perangkat desa, dan masyarakat untuk bersama-sama membantu kelancaran penyaluran serta pengawasannya. Kita berharap program BLT desa ini dapat menjaga asa masyarakat pedesaan dalam menghadapi wabah COVID-19. Dalam edisi ini, pembaca dapat mencari lebih lanjut tentang seluk beluk program BLT desa. Selamat membaca!

Rahayu Puspasari

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Kemenkeu



Majalah Media Keuangan
@majalahmediakeuangan

Dari empat kriteria penerima BLT desa di bawah ini, mana yang menurut Anda harus diprioritaskan sebagai syarat utama agar penyalurannya efektif dan tidak tumpang tindih?

- A. Keluarga Miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan
- B. Bukan penerima program

- C. Kehilangan mata pencaharian
- D. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit atau memiliki penyakit kronis.

@Yulmalida77
A. Saya pikir ini lebih mudah untuk pendataannya oleh daerah masing-masing dan menjadi tepat sasaran

@lasindah_nadiah
D. Karena untuk hal tersebut pasti mau tidak mau harus membutuhkan biaya yang besar

Jaga Pajak, Jaga Jarak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali membuka layanan tatap muka secara serentak pada pertengahan Juni (15/06). Dalam memberikan layanan perpajakan kepada wajib pajak dan masyarakat, DJP sangat memperhatikan protokol kesehatan dan menerapkan prosedur tertentu. Layanan konsultasi dilakukan dengan membuat perjanjian terlebih dulu melalui saluran yang telah tersedia seperti email, telepon, atau chat. Sebelum memasuki gedung kantor, setiap orang diukur suhu tubuhnya. Mereka juga diwajibkan mengenakan masker selama berada di dalam gedung dan menerapkan prinsip jaga jarak.



BENAHI IMPLEMENTASI RAIH FAEDAH OPTIMAL

Teks Dara Haspramudilla

Sebagai upaya menangani dampak COVID-19 terutama di pedesaan, pemerintah menetapkan penggunaan dana desa sebagai bagian dari jaring pengaman sosial (JPS). Dana desa direalokasi sebagai bantuan langsung tunai dana desa (BLT desa). BLT desa ditujukan untuk warga miskin yang kehilangan mata pencaharian karena pandemi COVID-19 dan juga belum mendapat bantuan apapun.

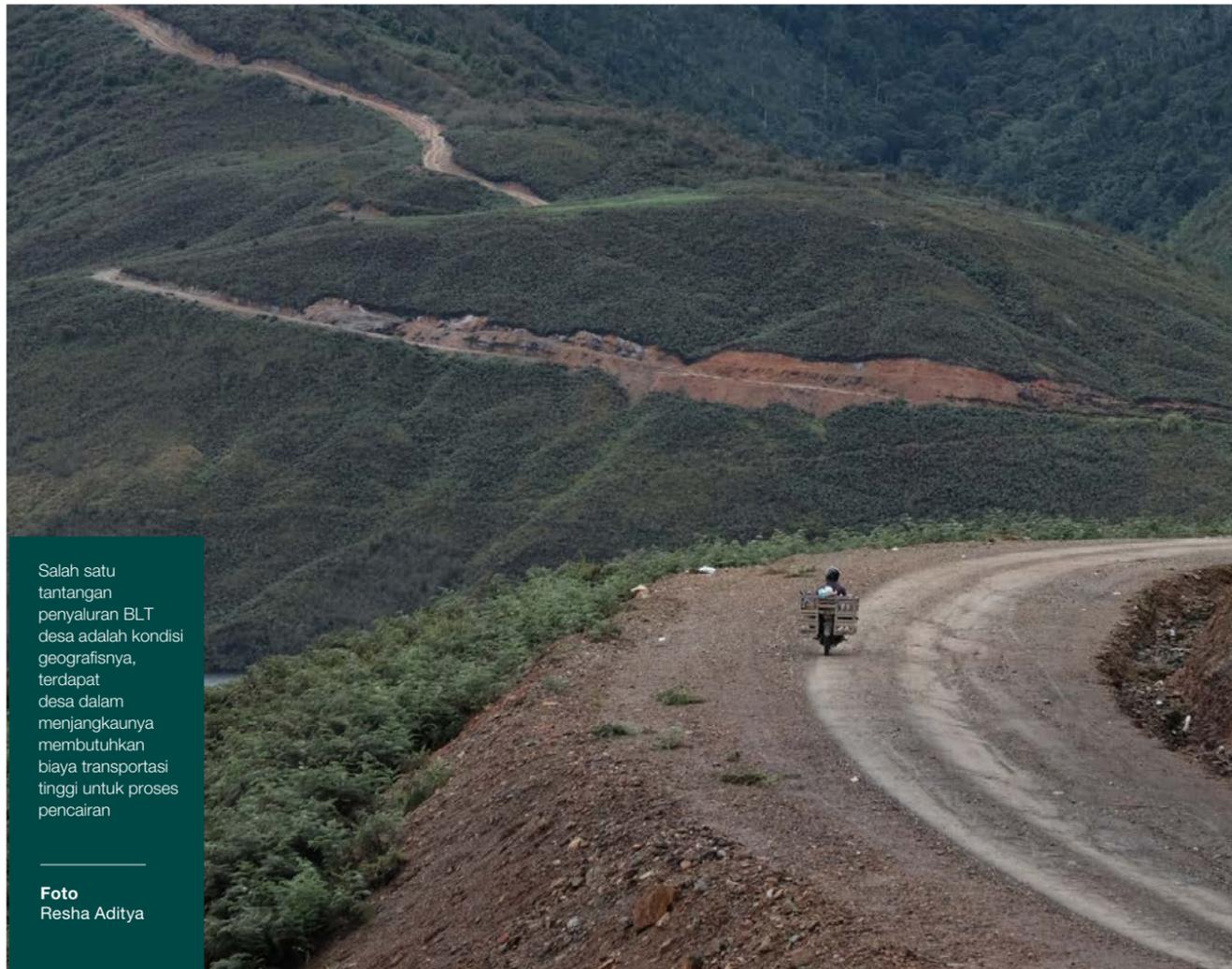
BLT desa sebagai bagian dari jaring pengaman sosial ditujukan untuk warga miskin yang kehilangan mata pencaharian karena pandemi COVID-19 dan juga belum mendapat bantuan apapun

Foto
Cahyo Afif

Program BLT desa merupakan program lintas K/L yang melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi serta Kementerian Dalam Negeri. Sebelumnya, nominal bantuan

yang diterima adalah Rp1,8 juta per keluarga penerima manfaat (KPM) menjadi Rp2,7 juta yang disalurkan selama enam bulan. Kenaikan nominal ini bertujuan untuk memberikan keleluasaan bagi pemerintah desa dalam menganggarkan BLT desa dalam APBDes termasuk memperluas cakupan KPM.

Menurut Direktur Eksekutif CORE, Moh. Faisal, secara konsep



Salah satu tantangan penyaluran BLT desa adalah kondisi geografisnya, terdapat desa dalam menjangkaunya membutuhkan biaya transportasi tinggi untuk proses pencairan

Foto Resha Aditya

program ini sangat bagus sebab dana langsung disalurkan ke desa. “Selama ini beberapa bantuan sosial diberikan *top-down* dan dalam perjalanannya menuju penerima ada banyak distorsi. BLT desa ini uangnya langsung diterima dan dikelola desa sehingga memotong banyak distorsi tadi,” ujarnya.

Faisal menambahkan bahwa salah satu urgensi BLT desa di masa pandemi ini adalah meski pedesaan dari sisi jumlah positif COVID-19 mungkin tidak sebanyak perkotaan tetapi efek negatif ekonominya sangat terasa.

“Secara umum jika kita melihat jati diri pedesaan, dia adalah penyuplai. Jadi, ketika ada masalah dalam hal distribusi, ada resesi ekonomi, ada wabah,

kemudian mereka harus dikarantina, semestinya mereka bisa *self-subsistent*. Namun, pada kenyataannya banyak yang tidak begitu,” ungkap Faisal.

Sinergi erat untuk kelancaran penyaluran

Dalam menyalurkan BLT desa diperlukan sinergi dari berbagai pihak yang terlibat. Nata Irawan, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri menyatakan pihaknya selalu berusaha aktif berkoordinasi dengan K/L terkait.

“Salah satu bentuk koordinasi rutinnnya adalah konsolidasi terhadap perkembangan penyaluran dana desa ke rekening kas desa dan pencairan BLT desa ke KPM. Selain itu, koordinasi yang dilakukan adalah *sharing* data dan

penyaluran BLT desa juga dalam evaluasi atas implementasinya,” terang Nata.

Selain itu, terkait penyaluran dan pencairan BLT desa, Kemendagri juga bersinergi dengan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

“Kami memastikan pelaksanaan penyaluran dan pencairan BLT desa berjalan dengan lancar dan terlaksana dengan baik. Rapat dengan pemerintah daerah dan juga K/L juga terus dilakukan secara virtual di masa pandemi ini,” tambahnya.

Hingga 28 Mei 2020, realisasi penyaluran BLT desa mencapai Rp3,24 triliun dan diterima oleh 5,48 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Sebanyak 122 kabupaten/kota telah

menyalurkan 100 persen BLT desa. Sebagai contoh, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang telah menyalurkan Rp21,1 miliar pada bulan April.

“Kami sudah menyalurkan dana tersebut untuk 35.269 KPM di 188 desa yang setara dengan 99,49 persen,” terang Humas Pemkab Banyuwangi.

Perbaiki data amat diperlukan

Tantangan terbesar dalam program ini adalah pendataan KPM. Menurut Nata, elaborasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan data calon penerima BLT desa menjadi dinamika tersendiri. “Ada tumpang tindih dengan data penerima bantuan dari program APBN yang lain. Selain itu data penerima BLT desa sifatnya dinamis. Data ini dapat berkurang maupun bertambah sewaktu-waktu tergantung verifikasi yang diajukan dari hasil musyawarah desa,” ungkapnya.

Faisal mengamini bahwa pendataan juga menjadi tantangan utama efektivitas penyaluran BLT desa. “Data untuk bansos dari pemerintah seringkali mengacu kepada sumber yang berbeda-beda. Belum lagi kepala desanya juga memiliki versi sendiri tentang data orang miskin,” tuturnya.

Menurutnya harus ada kombinasi dari sisi pendataan. Dari pemerintah pusat sudah memiliki data yang didasarkan pada indikator dan kriteria yang seragam. Namun, ketika sampai di desa juga perlu terbuka dengan masukan sebab dikhawatirkan data dari pusat belum menangkap dinamika di daerah.

“Nah, untuk meminimalisasi konflik kepentingan perlu adanya verifikasi. Hal itu memang bukan pekerjaan yang mudah tapi memang harus seperti itu. Jadi, jika menganggarkan bantuan sosial jangan hanya alokasi untuk dana bantuannya saja tetapi juga

alokasi untuk tata kelola distribusi untuk memastikan dana tersebut tersalur dengan baik dan efektif. Jika fokus di dana bantuan yang besar tapi efektivitasnya rendah, efek positifnya juga jadi rendah,” sarannya

Kejadian serupa juga dialami oleh Pemkab Banyuwangi. Banyaknya skema JPS yang diluncurkan dalam waktu berdekatan membuat verifikasi desa gugup. Untuk itu, beberapa strategi pun diterapkan agar penyaluran dapat tepat sasaran.

“Kami menggunakan inovasi “Smart Kampung” dalam melakukan proses pendataan calon KPM BLT desa yang berbasis nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga (KK). Kami juga melakukan transparansi melalui penggunaan teknologi informasi dan juga ada papan informasi di setiap desa dan tempat ibadah. Kami juga membuka layanan untuk masyarakat yang ingin melapor atau yang memiliki keluhan seputar penyaluran BLT desa secara daring,” terang Humas Pemkab Banyuwangi

Tantangan lain di lapangan

Menurut Nata, persoalan kelengkapan persyaratan juga menjadi kendala dalam penyaluran BLT desa. Namun demikian, setelah Kemenkeu memberi kemudahan dengan mengubah syarat penyaluran, BLT desa saat ini dapat disalurkan lebih cepat.

Selain itu, kendala lainnya adalah terkait geografis. “Ada desa yang dalam menjangkaunya membutuhkan biaya transportasi tinggi untuk proses pencairan. Ditambah lagi, adanya keterbatasan layanan perbankan di sana,” tuturnya.

Dari sudut pandang lain terkait geografis, Faisal menuturkan bahwa sebaiknya jumlah nominal bantuan tidak disamaratakan. “Nominal bantuan saat

ini jika di Jawa itu jelas cukup, tetapi kalau kita berpikir sampai ke daerah seperti di Maluku atau Papua jelas saja nilai itu tidak ada artinya,” jelasnya.

Faisal menambahkan persoalan integritas juga menjadi tantangan dari program bantuan sosial ini. “Keluhan yang datang terkait penyaluran yang tidak tepat sasaran yang kerap kali pemilihan penerima didasarkan subjektivitas kepala desa. (Kesuksesan) penyaluran BLT desa ini sangat bergantung pada perangkat pedesaan”, ungkap Faisal.

Agar BLT desa berhasil guna

Demi keberlangsungan program, Nata berharap agar sinergitas antar K/L dalam pembinaan dan pengawasan terhadap desa semakin baik dengan adanya kesesuaian regulasi yang dikeluarkan.

“Pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota perlu berperan aktif dalam memfasilitasi dan mendampingi desa dalam pelaksanaan BLT desa sehingga kebijakan ini dapat terlaksana dengan baik, tepat sasaran, transparan dan akuntabel”, terang Nata.

Harapan yang sama juga disampaikan Faisal. Menurutnya kesuksesan program ini sangat banyak dipengaruhi oleh kerja sama dan koordinasi kementerian dan lembaga terkait.

“Saya tahu Kemenkeu menyediakan dari sisi dananya, tetapi kesuksesan program ini memang sangat banyak dipengaruhi oleh institusi lain. Jadi, persoalannya bukan hanya seberapa besar stimulusnya, apa programnya, tetapi bagaimana setiap institusi menyadari peran penting mereka dalam program ini. Banyak orang terjebak dari sisi nilai, tapi masalah terbesar menurut saya bukan di situ,” pungkasnya.

KOMITMEN KUAT BANTU MASYARAKAT

Teks: Rini Septati D.I

Program bantuan pemerintah diharapkan mampu menjaga daya beli di tengah kemerosotan ekonomi yang sudah dirasakan masyarakat desa sejak awal pandemi merebak

Foto
Storypost /
Taufiqurrokhman

Selasa, 19 Mei 2020. Hari di Denpasar sudah merayap menuju gelap. Menteri Keuangan di Jakarta baru saja menerbitkan PMK 50/2020 yang mengubah ketentuan bantuan langsung tunai (BLT) desa. Selasa malam itu pula, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Denpasar menerima informasi perubahan ketentuan. Dalam waktu bersamaan, mereka mendapat instruksi agar segera menyalurkan BLT desa keesokan hari. Keluarga miskin dan tidak mampu di desa tak boleh menunggu lebih lama.

Kepala KPPN Denpasar Sri Martini menuturkan, pada 20 Mei 2020, seluruh petugas operator, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) penyalur dana desa *standby* untuk menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM). “Demikian pula sebagai Bendahara Umum Negara, Seksi Pencairan Dana dan Seksi Bank mengawal penyelesaian SPM sehingga Surat Perintah Pencairan Dana dapat terbit tanggal 20 Mei 2020,” ungkap wanita yang mulai memimpin KPPN Denpasar sejak Juni tahun lalu tersebut.

Kerja keras seluruh tim di KPPN Denpasar menjadikannya sebagai KPPN yang tercepat dalam menyalurkan BLT desa tahap I. Masyarakat di wilayah kerjanya yang meliputi Denpasar, Gianyar, Badung, dan Tabanan, dapat menerima BLT desa tepat waktu. Sri menegaskan, “KPPN Denpasar berkomitmen sepenuhnya dalam meyalurkan dana desa dengan cepat sesuai ketentuan agar manfaat BLT

desa dapat cepat pula dirasakan oleh keluarga miskin/tidak mampu di desa yang mengalami dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19.”

Ketepatan waktu penyaluran, menurut Sri, juga didukung oleh kapasitas SDM yang sangat baik dan memadai, baik di desa maupun di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai mitra kerja KPPN Denpasar. “Sebagai informasi tambahan, atas kinerja penyaluran dana desa pada 2019, desa di Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Badung ditetapkan menjadi Desa Mandiri sehingga berhak menerima penyaluran dana desa sebesar 60 persen dari pagu secara lebih awal dibandingkan desa lain yang hanya memperoleh 40 persen pada awal penyaluran,” jelas Sri.

Menjaga daya beli

Kebijakan keuangan negara pada masa pandemi mengakibatkan dana desa tahun 2020 mengalami penyesuaian menjadi Rp71,19 triliun dari sebelumnya Rp72 triliun. Karenanya, Direktur Dana Transfer Umum Ditjen Perimbangan Keuangan Adriyanto mengungkapkan pihaknya melakukan revisi terhadap PMK 205/2019 tentang pengelolaan dana desa. PMK 50/2020 merupakan revisi kedua yang mengatur relaksasi persyaratan, tahapan penyaluran, serta prioritas penggunaan dana desa.

“Dana Desa diprioritaskan untuk menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi COVID-19, berupa kegiatan penanganan pandemi dan jaring pengaman sosial di desa,” ujar pria yang meraih gelar Ph.D dari Australian National University itu.

Relaksasi persyaratan dan tahapan

penyaluran dana desa dilakukan untuk mempercepat penyaluran. “Jaring pengaman sosial di Desa berupa BLT desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu sebagai keluarga penerima manfaat (KPM). dana desa difokuskan untuk BLT desa sampai jangka waktu 6 bulan dan kami tidak membatasi jumlah dana desa yang dapat digunakan untuk BLT,” tutur Adriyanto. Langkah DJPK ini ialah bentuk tindak lanjut dari arahan Presiden sebelumnya.

Dalam rapat terbatas, Presiden mengatakan penanganan pandemi COVID-19 bisa melalui dua cara. Pertama, penyaluran bantuan sosial. Kedua, pelaksanaan program padat karya. Kedua program itu diharapkan mampu menjaga daya beli di tengah kemerosotan ekonomi yang sudah dirasakan masyarakat desa sejak awal pandemi merebak. Banyak yang kehilangan pekerjaan, bahkan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dari semula tiga bulan, BLT desa kemudian diperpanjang menjadi enam bulan. Bantuan dengan besaran Rp600.000 untuk bulan pertama sampai ketiga dan Rp300.000 untuk bulan keempat sampai keenam per KPM ini diharapkan mampu menjadi solusi.

“Perpanjangan pemberian BLT desa juga merupakan arahan Presiden untuk memberikan bantuan sosial ke masyarakat secara lebih luas supaya dapat menjaga daya beli masyarakat desa di tengah merosotnya perekonomian nasional akibat pandemi COVID-19,” tambah Adriyanto.

Pandemi mungkin masih berlanjut hingga beberapa bulan ke depan. Masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan bisa jadi bertambah. Demikian pula dengan jumlah penduduk miskin di desa. Tujuan perpanjangan ini sangat jelas, supaya masyarakat miskin dapat terbantu

dalam jangka waktu yang lebih lama dan mampu bertahan.

Tren percepatan penyaluran meningkat

Penyaluran BLT desa tahap I telah dilakukan sejak April 2020. Per 16 Juni 2020, jumlah BLT desa yang diberikan kepada KPM di berbagai desa di seluruh Indonesia sudah mencapai Rp4,008 triliun. Hal ini disampaikan Direktur Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan, Sudarso.

“Untuk bulan April, BLT desa tersalurkan kepada 50.468 desa atau 67 persen desa dengan jumlah KPM 5.712.240 dan nilai penyaluran Rp3,427 triliun. Untuk bulan Mei, tersalurkan kepada 8.640 desa dengan jumlah KPM 856.262 dan nilai penyaluran Rp513 miliar. Lalu, bulan Juni ini tersalurkan kepada 1.304 desa dengan 111.894 KPM dan nilai penyaluran Rp67 miliar,” rinci pria yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Kanwil Perbendaharaan Sumatera Selatan tersebut.

Menurut Sudarso, sejumlah daerah secara konsisten menunjukkan kinerja penyaluran yang bagus selama beberapa tahun ini. Tiga diantaranya yakni Provinsi Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Gorontalo. “Menurut pengamatan dan evaluasi kami, peran Pemda itu signifikan. Di tiga wilayah tersebut, Pemda yang provinsi maupun kabupaten/kota itu pro aktif untuk melakukan edukasi dan sosialisasi, serta melakukan koordinasi dengan Ditjen Perbendaharaan, baik di Kanwil maupun KPPN.”

Namun demikian, Sudarso mengakui bahwa tren percepatan penyaluran dana desa dari tahun ke tahun makin meningkat. “Artinya, semua pemda dan perangkat desa menyadari bahwa dana desa itu sangat penting, apalagi jika dikaitkan dengan tingkat kemiskinan misalnya. Kemiskinan di pedesaan lebih besar dibanding di perkotaan. Jadi, semangat pemda dan

perangkat desa untuk mempercepat proses penyaluran menjadi lebih baik,” tuturnya bersemangat. Ia menambahkan, akuntabilitas penggunaan dana desa kian baik. “Sampai dengan 2020, kasus penyalahgunaan dana desa menunjukkan kecenderungan penurunan yang sangat signifikan.”

Percepat penyaluran tahap II

“Tidak terdapat kendala berarti yang dihadapi oleh KPPN Denpasar secara internal dalam menyalurkan dana desa tahun 2020 yang penggunaannya diantaranya untuk keperluan BLT desa,” terang Sri Martini. Justru, menurutnya, pihak yang mengalami kendala adalah desa dan Pemda. Tambahnya, “Proses verifikasi membutuhkan waktu guna menetapkan calon penerima BLT desa bukan penerima program keluarga harapan (PKH), karu sembako, dan kartu pra kerja.”

Sudarso juga menilai tidak ada kendala berarti yang dia hadapi dalam aspek penyaluran. Namun, ia mengaku menghadapi hal yang cukup menantang dalam aspek monitoring dan evaluasi. “Penyaluran dana desa ini kan gelondongan masuk ke rekening kas umum daerah (RKUD) lalu masuk ke rekening kas desa (RKD). Di dalam RKD, salah satu penggunaannya adalah untuk BLT desa. Artinya, kami tidak memperoleh data secara langsung *by name by address*,” tuturnya.

Pemerintah memiliki target agar penyaluran tahap kedua bisa segera dilakukan. Salah satu diskresi yang diberikan oleh Ditjen Perbendaharaan yakni anggaran untuk penyaluran dana desa tidak diwajibkan untuk menyampaikan rencana penyerapan dana ke KPPN. “Ini merupakan upaya untuk mempercepat penyaluran dana desa dari kas negara. Jika penyaluran lancar, BLT desa juga akan menjadi lancar,” pungkas Sudarso.

ASURANSI BMN

Pengasuransian BMN dilakukan menggunakan satu produk asuransi BMN yang telah mendapatkan persetujuan dari lembaga pengawas industri jasa keuangan di Indonesia.

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara

PRINSIP ASURANSI BMN

BMN dapat diasuransikan berdasarkan prinsip:



Selektif



Efisiensi



Efektivitas



Prioritas

OBJEK ASURANSI BMN

BMN yang menjadi objek asuransi adalah BMN berupa gedung dan bangunan dengan kriteria antara lain:

berdampak terhadap pelayanan umum apabila rusak atau hilang; dan/atau



menunjang kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan.



TUJUAN ASURANSI BMN



Pengamanan Barang Milik Negara.



Menjamin keberlangsungan pelayanan umum.



Menjamin kelancaran tugas & fungsi penyelenggaraan pemerintahan.



Didasari pertimbangan kemampuan keuangan negara.



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

JARING Pengaman SOSIAL BLT DESA

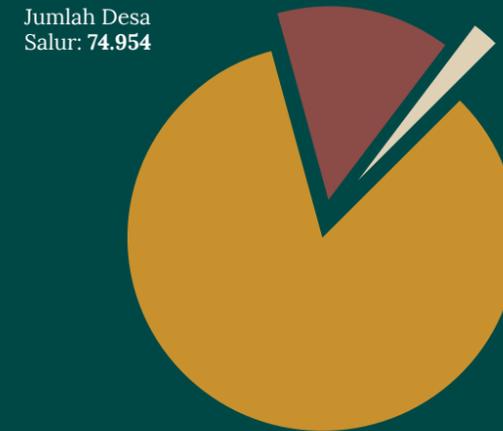
Dampak pandemi COVID-19 hampir merata dirasakan di seluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali masyarakat di lingkungan pedesaan. Oleh karenanya, bantuan pemerintah juga menyasar kepada masyarakat desa melalui bantuan langsung tunai desa (BLT desa). Lalu apa itu BLT desa dan sejauh mana BLT desa telah membantu masyarakat desa?



Realisasi Penyaluran BLT desa

Realisasi per 6 Juni 2020

Jumlah Desa Salur: 74.954



Periode I: 50.468
Periode II: 8.640
Periode III: 1.304

Jumlah Keluarga Penerima manfaat



Periode I: 5.712.240
Periode II: 856.262
Periode III: 111.890

Apa itu BLT desa

Bantuan langsung tunai desa (atau BLT desa) adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari dana desa, untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi COVID-19.

Tujuan penyaluran BLT desa

- Menjaga daya beli masyarakat desa di tengah merosotnya perekonomian nasional karena pandemi COVID-19.
- Membantu masyarakat desa yang miskin dan tidak mampu supaya tetap bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
- Membantu masyarakat desa yang terkena PHK dan menderita penyakit kronis
- Membantu perekonomian desa dengan semakin banyaknya uang tunai di desa dengan mendorong masyarakat desa berbelanja di desanya.

Kriteria Penerima BLT desa

- Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan
- Bukan penerima program bantuan lain seperti program keluarga harapan (PKH), Kartu sembako, kartu pra-kerja, dan bantuan sosial tunai
- Kehilangan mata pencaharian
- Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit atau memiliki penyakit kronis.

Besaran Penyaluran BLT desa

- Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat;
- Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat. Jangka waktu pemberian BLT desa dilakukan dalam 6 (enam) bulan dan dilaksanakan paling cepat pada bulan April 2020.

PENAWAR LARA ITU BERNAMA BLT desa

Teks Yani Kurnia Astuti

Persebaran kasus COVID-19 terjadi begitu masif di perkotaan. Namun, guncangan ekonomi dan sosial akibat diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) guna mengendalikan wabah, tak ayal terasa juga hingga ke desa-desa. Akibatnya, masyarakat desa menjadi salah satu kelompok rentan yang berisiko kehilangan penghasilan, bahkan mata pencaharian. Potensi melonjaknya jumlah penduduk miskin akibat fenomena ini, jadi perhatian serius bagi pemerintah guna menemukan jalan keluar.

Lindungan di Tengah Pagebluk

Gairah Roni tak seriu desir angin yang menyibak dedaunan di tepian pantai. Riak tenang ombak air laut, rupanya tak mampu mendamaikan keresahan hatinya ihwal kapan ia bisa kembali mengembangkan layar kapalnya, untuk menangkap ikan. Alih-alih mencicipi berkah tingginya harga jual ikan di awal musim, Roni justru harus memutar otak, sekadar untuk beroleh harga impas ganti

solar kapalnya. Sejak pagebluk COVID-19, hasil tangkapan ikannya hanya dihargai sekenanya, imbas turunnya permintaan dari kota. Ikan tenggiri, misalnya, terpaksa diobral seharga Rp15.000 per kilo. Padahal, pada kondisi normal, harganya bisa mencapai Rp40.000 per kilo. Malangnya lagi, selain anak istri yang perlu dihidupi, pria berperawakan kurus ini masih harus merawat sang ayah yang mengidap penyakit asma.

”Kerja sudah tidak bisa, ke kebun juga tak bisa, apalagi ke laut”, ujar Roni sendu dengan dialek khas daerah setempat. Pulau kecil yang terdiri dari empat dusun, tempat Roni tinggal, memang dikenal sebagai pemasok ikan. Itu sebabnya, sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Beruntung, pria bernama lengkap Ahmad Roni ini adalah salah satu penduduk yang keluarganya masuk ke dalam daftar keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan langsung tunai (BLT) Desa Pongok, Kecamatan Lepar Pongok, Bangka Selatan.

Sebelum menerima BLT desa, Roni mengaku tak pernah mendapat bantuan apapun dari pemerintah, baik pusat maupun daerah. Setelah pengurus desa mendatangi rumahnya untuk menyalurkan bantuan uang tunai tersebut, Roni dan keluarganya bisa sedikit bernapas lega di tengah kesulitan ekonomi akibat pandemi. “Makin *gak* ada kerjaan (karena COVID-19),

cuma ada BLT kami jadi terbantu”, ujarnya. Roni merinci, hingga saat ini, ia telah dua kali menerima BLT desa dengan besaran bantuan masing-masing Rp600.000. Uang tersebut telah ia gunakan untuk membeli bahan pokok kebutuhan sehari-hari, bahkan juga ia sisihkan guna menebus obat asma untuk sang ayah.

Lindungan sosial ini, tak hanya dirasakan penduduk di kepulauan Bangka Belitung. BLT desa yang dikururkan dari anggaran dana desa ini, setidaknya telah menjangkau lebih dari 5 juta KPM di seluruh wilayah Indonesia. Termasuk Maryono, penduduk yang tinggal di Dusun Niron, Pandowoharjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai buruh lepas di toko mebel ini, telah menerima BLT desa sebanyak dua kali secara tunai. Sedikit berbeda dengan Roni, Maryono mendapat undangan dari kelurahan setempat untuk memperoleh bantuan dengan besaran Rp600.000. Bantuan tersebut harus ia ambil sendiri di kantor kelurahan sesuai jadwal yang tertera dalam surat.

Tak Boleh Tumpang Tindih

Efektivitas penyaluran BLT desa tak lepas dari kesigapan juga kejelian para perangkat desa. Agar tepat sasaran dan sesuai tujuan, sejumlah kriteria yang perlu dipenuhi sebagai penerima BLT desa dipublikasikan secara terbuka oleh pemerintah. Kriteria ini menjadi pedoman



Efektivitas penyaluran BLT desa tak lepas dari kesigapan dan kejelian para perangkat desa agar tepat sasaran dan sesuai tujuan penyaluran.

Foto
Dok. Desa Kemujan, Kebumen

bagi para perangkat desa untuk mengusulkan daftar nama penerima BLT desa. Dengan demikian, tidak terjadi tumpang tindih dengan bantuan lainnya, sehingga BLT desa betul-betul ampuh sebagai penawar lara bagi masyarakat desa terdampak pandemi COVID-19.

Tak hanya itu, proses pengusulan data penerima BLT juga telah melalui proses musyawarah desa yang dihadiri kepala Desa, pengurus desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan pendamping desa. Faktanya, beberapa desa juga menggandeng sejumlah relawan untuk membantu proses pendataan calon KPM, seperti yang dilakukan Aris Widijono, Kepala Desa Kemujan, Adimulyo Kebumen, Jawa Tengah. “Yang terlibat dalam relawan adalah ketua RT, ketua RW, BPD, perangkat desa, ada LMD (Lembaga Mediasi Desa), dan juga tokoh masyarakat yang bergabung di tim data”, Aris menyebutkan.

Sebagai dasar penentuan KPM BLT desa, Kepala Desa Kemujan, Jawa Tengah beserta tim juga

mempertimbangkan data penerima bantuan sembako regular, maupun sembako perluasan. Tujuannya, agar penerima tidak menerima dobel bantuan. Namun, pria berkaca mata ini juga mengeluhkan perbedaan waktu antara bantuan pemerintah satu dengan yang lainnya. Akibatnya, penyaluran BLT desa di wilayahnya perlu menunggu cairnya bantuan lain, agar distribusi bantuan bisa dilakukan bersamaan dan menghindari komplain dari warga desa. “Waktu kemarin menyesuaikan (dengan waktu) bantuan lain yang belum cair, sehingga kita pencairan itu agak sedikit di belakang, di akhir bulan”, ungkap pria asli Kebumen ini

Melengkapi Bantuan Lain

Bayang-bayang akan penurunan pendapatan serta lesunya ekonomi akibat wabah, tak ayal meningkatkan risiko semakin banyaknya masyarakat miskin. Untuk itu, pemerintah pusat maupun daerah bekerja sama dalam menyiapkan jaring pengaman sosial. Beberapa program telah diluncurkan lebih dulu, antara lain program keluarga harapan, kartu pra kerja, bantuan sembako, bansos tunai, dan subsidi listrik. Oleh

sebab itu, kehadiran BLT desa semakin melengkapi cakupan penerima bantuan.

I Dewa Ketut Suagiman, Kepala Desa Batuaji, Tabanan, Bali menyebutkan dengan adanya BLT desa, warga yang menerima bantuan menjadi lebih banyak, mengingat tak semua usulan tertampung di daftar penerima bantuan dari Kementerian Sosial. “Data valid yang keluar dari Kemensos sebanyak 244 Kepala Keluarga (KK), sementara saya ajukan 290 KK. Dengan adanya BLT desa bisa nambah 5 KK (penerima bantuan), jadi bisa *ter-back up*”, terangnya.

Hal senada diungkapkan Aris. Dia menuturkan, BLT desa dapat menambah jangkauan penerima bantuan. “Jadi, untuk BLT desa itu *kan* kemarin rencana untuk sapu bersih ya bahasanya”, terang Kepala Desa yang sudah dua periode dipercaya untuk memimpin Desa Kemujan, Jawa Tengah ini. Pada akhirnya, BLT desa diharapkan mampu menjadi bantalan ekonomi dan sosial, khususnya bagi masyarakat di pedesaan selama masa pandemi ini.

AGAR MANFAAT SAMPAI KEPADA YANG BERHAK

Teks CS. Purwowidhu | Foto Dok. Kemendes PDDT

Pandemi COVID-19 berdampak langsung pada kesehatan dan ekonomi. Seluruh kalangan masyarakat pun tak luput bergelut dalam perjuangan melawan sampar ini, terlebih rakyat miskin. Data Badan Pusat Statistik di awal tahun 2020 menunjukkan 60,23 persen dari total jumlah penduduk miskin ada di perdesaan. Pemerintah berupaya menjamin keberlangsungan hidup rakyat miskin di desa pada masa krisis pandemi ini melalui pemberian bantuan langsung tunai dari dana desa (BLT desa). Simak wawancara Kementerian Keuangan dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, mengenai implementasi program BLT desa.

Apa yang menjadi dasar pemikiran dikeluarkannya kebijakan penggunaan dana desa untuk program BLT desa?

Di tengah pemulihan kondisi akibat pandemi COVID-19 yang kita belum tahu sampai kapan,

kesehatan dan ekonomi menjadi fokus perhatian di Kementerian Desa, utamanya terkait dengan dana desa. Oleh sebab itu, kita keluarkan kebijakan. Pertama untuk kesehatan sebagai upaya pencegahan kita bikin yang namanya Desa Tanggap COVID-19. Setiap desa wajib membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19 untuk melakukan edukasi, sosialisasi, dan fasilitasi. Kedua, Kebijakan penanganan ekonomi ditujukan untuk meningkatkan daya beli dan ketahanan ekonomi dengan bentuk padat karya tunai desa (PKTD) dan kebijakan BLT desa. Program BLT desa ini kita sinergikan betul dengan Kementerian Keuangan baik dari sisi regulasi maupun pelaksanaannya.

BLT desa ini kan sebuah kebijakan sementara yang lahir karena COVID-19. Alasan desa dilibatkan yaitu karena adanya dana desa dan pendataan di level desa jauh lebih valid dan akurat. Itu sebabnya di dalam regulasi terkait BLT desa, saya tekankan betul, bagaimana melakukan pendataan dan siapa saja yang didata.

Mengapa besaran BLT desa di setiap tahapnya berbeda?

Besaran BLT desa di tiga bulan pertama mulai April, Mei, Juni, setiap keluarga penerima manfaat (KPM) menerima Rp600 ribu. Kemudian tiga bulan kedua Juli, Agustus, September, setiap KPM menerima Rp300 ribu, turun separuh karena ekonomi misalnya UMKM diperkirakan sudah mulai menggeliat.

Bagaimana mekanisme pendataan penerima manfaat BLT desa?

Pendataan dilakukan oleh Relawan Desa Lawan COVID-19 yang terdiri dari kepala desa sebagai ketua, ketua Badan Pengawas Desa sebagai wakil ketua, kemudian anggota yang terdiri dari perangkat desa, sekretaris desa, ketua RT, RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan.

Pendataan terhadap calon KPM BLT desa berbasis RT untuk keakuratan verifikasi di lapangan dan dilakukan oleh tiga orang untuk memastikan validitasnya. Itu pun masih difilter lagi dengan musyawarah desa khusus (Musdesus), lembaga permusyawaratan tingkat tertinggi di desa. Apapun yang dihasilkan Musdesus itu adalah sebuah keputusan politik yang sudah merepresentasikan warga masyarakat desa, dengan catatan Musdesus dilakukan sesuai dengan ketentuan. Setelah hasil Musdesus yang berisi nama-nama calon penerima BLT desa ditandatangani kepala desa, hasil pendataan dan musyawarah Musdesus tersebut lalu dikirim ke kabupaten untuk disinkronisasi. Dengan demikian, validitas dalam upaya pendataan calon penerima manfaat itu akan sangat bisa dipertanggungjawabkan.

Upaya apa yang dilakukan agar tidak terjadi overlapping data dengan penerima bansos lainnya?

Desa cukup terkendala untuk mendeteksi warga yang sudah dapat bantuan sosial (Bansos) karena pencairan Bansos seperti program keluarga harapan (PKH) tidak melalui desa melainkan langsung dari pusat jadi ini berada di luar kendali pemerintah daerah sehingga proses sinkronisasi data penerima BLT desa ini menunggu selesainya Bansos dari pusat tersebut. Jadi memang banyak desa yang menggunakan BLT desa sebagai sapu

jagatnya. Jadi kalau warga sudah terima bantuan sosial tunai (BST), terima PKH, maka rongga yang masih kosong itu diisi dengan BLT desa.

Hal tersebut juga terkonfirmasi dari simulasi yang kita lakukan. Dari simulasi, kita akan mengcover sekitar 12 juta KPM, ternyata dalam perjalanannya prediksi kita sampai 100 persen salur itu sekitar 8 juta KPM. Ini kesannya sangat turun karena sudah tertutup dengan Bansos lain di luar BLT desa. Nah, ke depan, kita sudah diskusi dengan Kementerian Sosial dan Kemenko PMK agar data yang ada sekarang ini dikelola dengan baik dan kita serahkan sepenuhnya ke desa.

Desa lebih memahami lingkungan dan masyarakatnya sendiri sehingga akan lebih mudah transparansinya karena skalanya kecil. Misalnya, di balai desa tiap tahun ditampilkan hasil *updating* penerima manfaat semua jaring pengaman sosial. Nah, data ini harus setiap tahun *diupdate* karena dengan pergerakan ekonomi yang bagus bisa saja tahun kemarin dia berhak menerima, tahun ini sudah tidak berhak, karena usahanya bagus. Semua itu akan efisien efektif ketika diserahkan ke desa.

Kapan target penyaluran BLT desa diperkirakan tercapai 100 persen?

Juni ini harus selesai. Berdasarkan data per tanggal 15 Juni, sudah mencapai sekitar 90 persen desa selesai menyalurkan BLT desa tahap pertama. Kita juga sudah akan keluarkan perubahan Permendes untuk mengakomodir angkatan kedua triwulan kedua dengan nilainya dan bagaimana mekanismenya. Mekanismenya adalah semua data yang sudah berjalan itu dipakai sebagai data awal, tetapi tidak menutup kemungkinan ada penambahan atau pengurangan. Kuncinya cuma satu, Musdesus karena sudah semua komponen masuk di situ.

Apa yang Kementerian Desa lakukan untuk monitoring penyaluran BLT desa?

Ada dua, satu turun langsung, yang kedua *by phone by confirmation* tiap hari. Setiap hari kita punya *update* data, misalnya jam 7 atau 8 malam komunikasi mulai dilakukan dengan sumber dan tim yang sudah kita siapkan, sekitar jam 10 malam baru selesai data hari ini, lalu keesokan harinya kita laporkan. Jadi setiap hari saya membuat laporan terkait dengan *progress* BLT desa, PKTD, dan Desa Tanggap COVID-19.

Bagaimana upaya mencegah tindakan oknum-oknum tidak bertanggung jawab dalam hal pemberian BLT desa?

Sudah ada beberapa keluhan yang kita terima, tetapi setelah kita verifikasi kecil sekali yang sampai masuk ke ranah penegak hukum. Kita juga banyak menemukan yang *hoax* sih, misalnya ada potongan Rp200 ribu, ternyata setelah kita cek itu duitnya memang sudah dibagi oleh penerima. Kemudian ada lagi kesepakatan bersama di desa misalnya calon KPM banyak, sedangkan kekuatan BLT desanya cukup kecil sehingga KPM membagi seikhlasnya sebagai wujud toleransi kepada keluarga yang lain. Hal semacam ini tidak masalah kalau mau dilakukan, yang penting tidak ada paksaan dan tidak dikelola oleh pemerintah desa. Ada juga kasus oknum aparat desa minta bagian BLT desa kepada KPM dengan alasan sudah memperjuangkan di Musdesus. Untuk kasus seperti ini, apabila setelah diverifikasi ternyata betul maka kita serahkan kepada penegak hukum.

Itu sebabnya dari awal di regulasi saya inginnya pemberian BLT desa ini *cashless* untuk memitigasi risiko keamanan. Tetapi dari sisi perbankan belum siap untuk melayani seluruh nasabah baru, dan dari sisi kebiasaan warga desa juga masih belum siap.

**Wawancara ini disadur dari wawancara Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak dengan Menteri Desa PDDT pada kanal Youtube Frans Membahas*



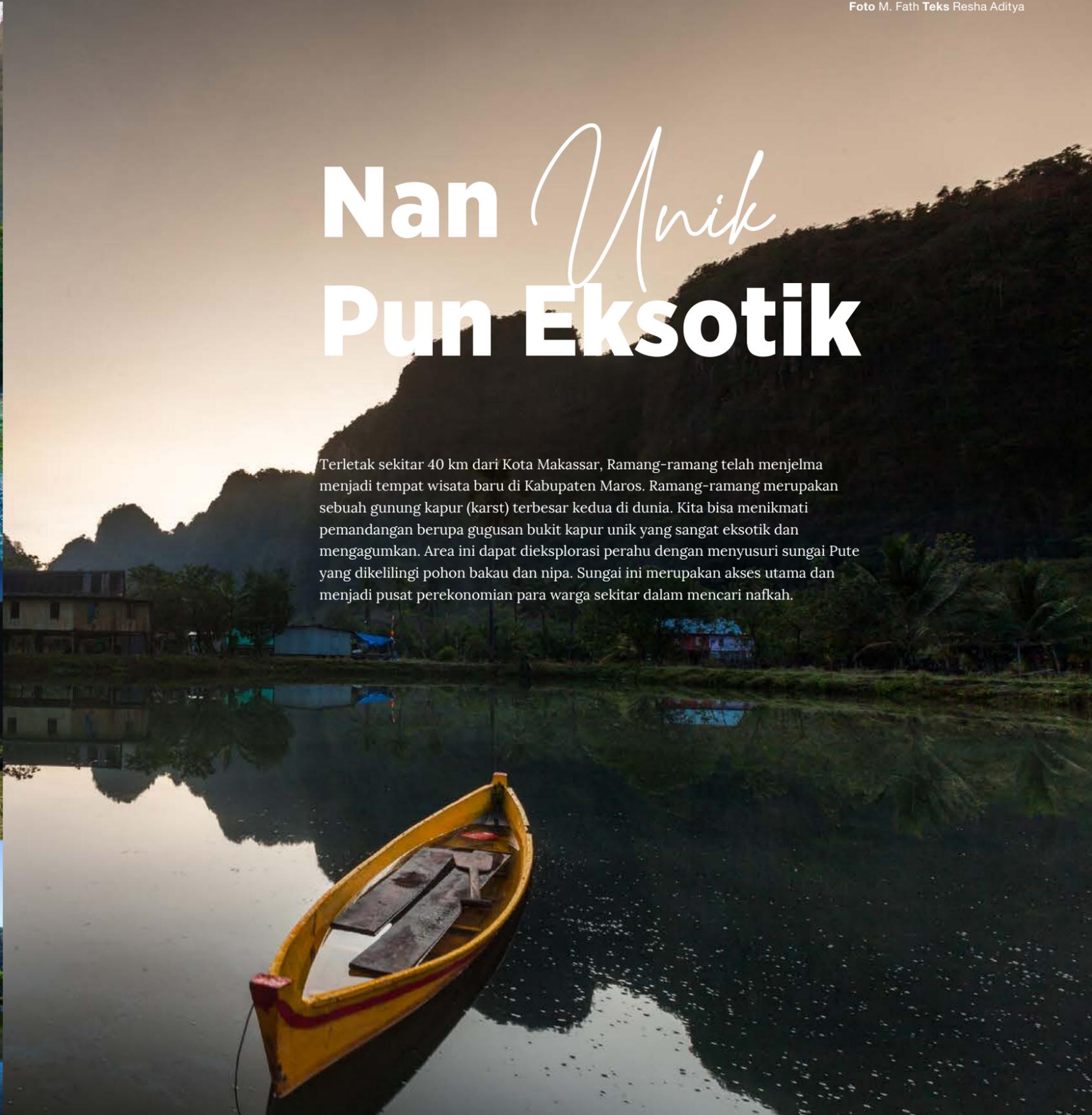
Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi

Abdul Halim Iskandar



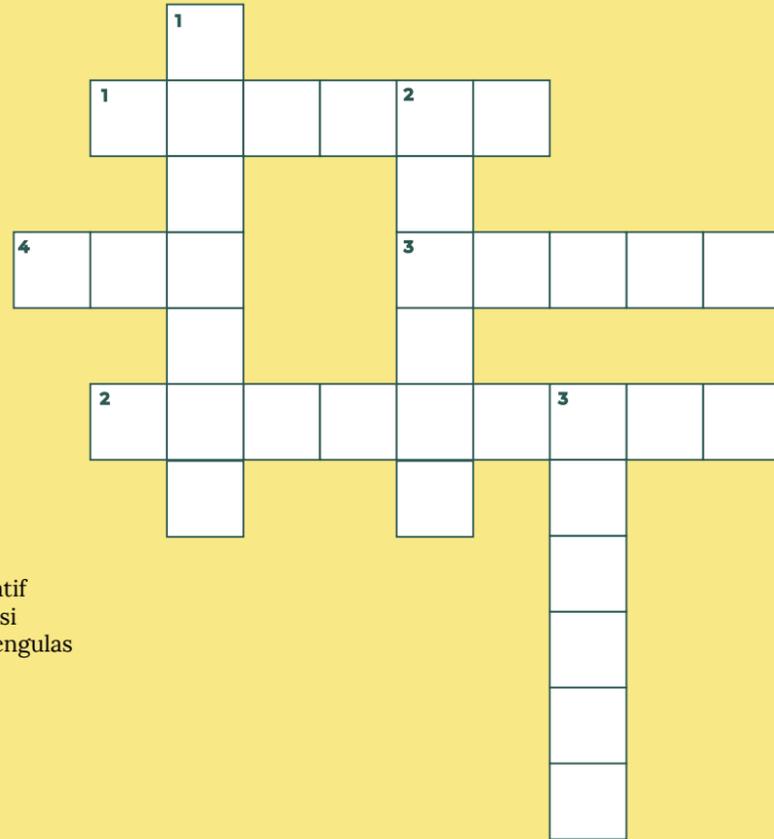
Nan Unik Pun Eksotik

Terletak sekitar 40 km dari Kota Makassar, Ramang-ramang telah menjelma menjadi tempat wisata baru di Kabupaten Maros. Ramang-ramang merupakan sebuah gunung kapur (karst) terbesar kedua di dunia. Kita bisa menikmati pemandangan berupa gugusan bukit kapur unik yang sangat eksotik dan mengagumkan. Area ini dapat dieksplorasi perahu dengan menyusuri sungai Pute yang dikelilingi pohon bakau dan nipa. Sungai ini merupakan akses utama dan menjadi pusat perekonomian para warga sekitar dalam mencari nafkah.





Medika *Teka *Teki*



Mendatar

- 1. Pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif
- 2. Daya tampung, kemampuan memproduksi
- 3. Rubrik dalam Media Keuangan yang mengulas daya tarik suatu wilayah
- 4. Badan Layanan Umum

Menurun

- 1. Desa penerima BLT Desa dalam rubrik Laporan Utama
- 2. Penyelesaian masalah, jalan keluar
- 3. Tabungan Perumahan Rakyat

Kirim jawaban Anda melalui story post instagram dengan tag IG @majalahmediakeuangan atau melalui email mediakeuangan@kemenkeu.go.id, sertakan nama dan nomor telepon yang dapat dihubungi

Jawaban kami tunggu sampai tanggal 10 Agustus 2020.

*Teka *Teki*



Hamman Riza,
Kepala BPPT

Foto
Anas Nur
Huda

Mereduksi Risiko Bencana

Teks Reni Saptati D.I

Masih ingat banjir besar yang menerjang ibu kota awal tahun ini? Untuk menyelamatkan warga, salah satu langkah yang diambil yaitu memodifikasi cuaca untuk menurunkan curah hujan. Teknologi modifikasi cuaca (TMC) dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) digunakan sehingga dampak banjir di Jabodetabek mampu diminimalkan. Namun, sesungguhnya banyak manfaat lain dari TMC. Kepala BPPT Hamman Riza menceritakannya dalam perbincangan dengan Media Keuangan berikut ini.



Bagaimana awal mula penggunaan TMC di Indonesia?

TMC di Indonesia ini bermula saat BPPT berdiri. Almarhum Prof. Dr. B.J. Habibie yang saat itu menjabat sebagai Penasehat Presiden Bidang Teknologi adalah pendirinya.

Pada tahun 1977, proyek percobaan hujan buatan dilakukan di daerah Bogor, Sukabumi, dan Solo. Pak Habibie ingin mencontoh keberhasilan pemerintah Thailand yang melakukan operasi hujan buatan untuk mendorong produktivitas sektor pertanian. Sampai saat ini, hal itu masih dilakukan secara *continue* oleh pemerintah Thailand. Bahkan, di sana ada satu departemen khusus modifikasi cuaca untuk hujan buatan. Pesawatnya juga memakai pesawat CN235 dari Indonesia.

Pada tahun 1985, BPPT membuat Unit Pelaksanaan Teknis Hujan Buatan (UPTHB) yang mempunyai tugas meningkatkan intensitas curah hujan, serta mengisi waduk irigasi teknis dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Nah, meneruskan itu, sekarang ada Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca (B2TMC).

Sejauh mana peran TMC dalam meminimalkan dampak bencana?

Bencana itu ada dua jenis. Pertama, bencana hidrometrologis karena curah hujan tinggi, seperti banjir dan longsor. Kedua, bencana geologi, misalnya gempa yang menyebabkan tsunami, atau gunung meletus. Nah, TMC ini untuk bencana hidrometrologis. Jangan diartikan TMC ini adalah upaya untuk membuat hujan. Hujannya asli, bukan hujan KW 1 atau KW 2. Kita hanya mempercepat proses terjadinya hujan. Oleh karenanya, kita membutuhkan awan.

Misal terjadi hujan lebat yang intensitasnya sangat tinggi sehingga dapat menyebabkan banjir di suatu daerah. Kita akan mempercepat terjadinya hujan sebelum awan-awan sampai di daerah tersebut. Sebutlah di Jakarta. Jika awan itu masih jauh dari Jakarta, kita datangi awannya, kita semai supaya hujan turun lebih cepat. Itulah yang disebut dengan *cloud seeding*.

Cloud seeding ini menyemai awan dengan garam. Kita juga menyebutnya *jumping process* untuk *rain making*. Sebab kita melompat supaya lebih cepat terjadi hujan. Sebelum awan masuk

Proyek hujan buatan oleh BPPT

Foto Dok. BPPT

ke Jakarta, kita langsung semai supaya hujan sudah turun di laut, misalnya di Selat Sunda atau di Laut Jawa. Walaupun masih ada sisa awan yang masuk ke Jakarta, hujan yang turun sudah berkurang intensitasnya.

Berapa personil yang dibutuhkan dalam proses penyemaian?

Operasi TMC terdiri dari banyak personil. Kita bekerja sama dengan Tentara Nasional Angkatan Udara (TNI AU) untuk menyediakan pesawat. Kita membangun posko. Untuk banjir Jabodetabek, poskonya di Lanud Halim Perdanakusuma. Saat menangani kebakaran hutan dan lahan di Riau, kita punya posko di Bandara Pekanbaru. Posko dikomandoi seorang koordinator lapangan yang dibantu *flight scientist*.

Nah, *flight scientist* akan menyiapkan *track* sebagai arah terbang pesawat menuju awan yang berpotensi menurunkan hujan tinggi. Oleh karenanya, awan itu harus dikejar sebelum dihembus angin dan masuk ke sebuah daerah. Jadi, *flight scientist* bertugas untuk menganalisa kondisi cuaca dan mengarahkan pilot. Lalu, biasanya ada dua pilot dan satu *flight engineer*.

Ada juga orang yang menggerakkan sistem garam supaya garam bisa keluar dari pesawat dan tersemai. Kalau pakai pesawat besar CN235, ada lima orang yang mengoperasikan alat penyemai awan. Selain itu, sebelum terbang ada juga seorang ahli cuaca dari BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) yang mengumpulkan data operasi serta menginformasikan prediksi cuaca dan kondisi hujan. Jadi tim ini cukup banyak dan membutuhkan *teamwork* yang baik antara BPPT dengan BMKG, TNI AU, juga BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana).

Seperti apa bahan semainya?

Bahan semai berupa garam sudah

bisa produksi sendiri melalui industri dalam negeri. Garam itu harus diproses dulu supaya betul-betul halus atau mikroskopis. Nantinya pada saat disemai, bahan itu langsung terserap awan sehingga kondensasi cepat terjadi. Proses kondensasi di dalam awan ini menghasilkan curah hujan.

Bagaimana penguatan peran TMC ke depannya dalam mereduksi risiko bencana?

Sebenarnya TMC harus dijadikan bagian pencegahan. Misalnya dalam kasus kebakaran lahan gambut. Saat lahan gambut padam di sisi atas, di sisi bawahnya masih membara lho. Jadi, jika mau terbebas dari kebakaran lahan gambut, kita perlu membasahi lahan gambut sebelum muncul titik api.

Kalau sudah muncul titik api dan kebakaran, yang harus dilakukan ya operasi *water bombing* dan TMC supaya hujan turun. Padahal, langkah itu justru membutuhkan biaya yang besar. *Water bombing* perlu menyewa helikopter, biayanya besar sekali. Supaya jangan sampai mengeluarkan biaya sebesar itu, upaya pencegahan dimaksimalkan. Karenanya saya berharap kita bisa seperti Thailand yang melakukan TMC sepanjang tahun untuk melakukan modifikasi cuaca.

Indonesia mengalami cuaca ekstrem, baik di musim hujan maupun kemarau. Kita sudah tahu kapan harus memitigasi dan ini penting dilakukan secara rutin. Saya sedang berupaya agar pemerintah mengalokasikan cukup anggaran untuk sarana, pesawat, dan bahan semai, serta mengatur *schedulling* operasi TMC.

Harus ada upaya menggerakkan teknologi semaksimal mungkin supaya hidup kita lebih baik. Dampak dari bencana harus kita minimalkan. Banjir, puluhan ribu orang mengungsi, serta biaya kedaruratan jauh lebih besar dibanding jika kita bisa melakukan mitigasi bencana.

Selain terkait bencana, apa saja manfaat lain dari TMC?

Fenomena alam *el nino* memicu cuaca ekstrem kekeringan yang menyebabkan gagal panen. Kegagalan panen berimplikasi sangat besar terhadap seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, Raja Thailand membuat departemen khusus hujan buatan sebagai sedekah kepada rakyat. Dalam satu tahun, puluhan milyar atau puluhan juta bath digelontorkan untuk mengoperasikan sekitar 6-10 pesawat yang memodifikasi cuaca. Terjadi hujan, kekeringan bisa diatasi, dan pertaniannya pun subur.

Sebenarnya, polusi udara bisa diatasi dengan hujan buatan. Kita membuat hujan dengan NaCl dan materi lain yang bisa membuka kabut asap. Kita juga melakukan pengisian waduk PLTA dan danau untuk irigasi. Selain itu, kita pernah mengamankan daerah pertambangan dan proyek konstruksi. Mitigasi untuk pembangunan infrastruktur juga bisa dilakukan dengan modifikasi cuaca. Jadi, TMC ada banyak manfaatnya dan memang kita harus rutin melaksanakannya.

Adakah dampak negatif dari TMC?

Beberapa orang menyebut TMC mengakibatkan hujan asam. *It's totally wrong*. Justru kita ingin memberikan dampak positif kepada lingkungan. Karenanya kita menggunakan zat-zat semai itu. Bahan semainya pasti *environmental safe*. Untuk memastikan kondisi itu, sampel air hujan selalu kita uji untuk meyakinkan bahwa tidak ada dampak negatif.

Di laboratorium BPPT, kita melihat semua efek dari bahan semai yang ditaburkan ke awan. Bahan semai kita teliti, kita uji, dan hasil yang diperoleh selama ini tidak ada perubahan dalam komposisi kandungan airnya. Kita sadari air tadah hujan juga merupakan salah satu solusi penyediaan air baku bagi masyarakat.

SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK

Sidang Sonder Perjumpaan

Teks A. Wirananda

Sejak reformasi 1998, Indonesia terus berbenah di banyak sektor. Pengelolaan keuangan negara, sebagai perkara yang fundamental, tentu jadi bagian yang tak luput dari perubahan. Usai meramu ulang format dan periode pelaporan kekayaan rakyat, giliran institusi pengelola kekayaan ini yang mengalami penyesuaian. Berbagai perubahan itu pada akhirnya berdampak pula pada prosedur penerimaan negara, belanja negara, serta berbagai risiko yang melekat padanya.

Pada 2000, tata cara perpajakan mengalami perubahan untuk pertama kali sejak kelahirannya pada 1983. Perubahan ini jelas berdampak pula pada risiko dalam pelaksanaannya. Layaknya hal-hal lain yang berkaitan dengan finansial, iuran wajib ini tentu membuka ruang terjadinya sengketa. “Karenanya diperlukan suatu Pengadilan Pajak yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia dan mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian Sengketa Pajak,” demikian bunyi konsiderans Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Lantas berdasarkan peraturan itu, berdirilah Pengadilan Pajak.

Setahun usai terbentuknya Pengadilan Pajak, melalui Keputusan

Presiden Nomor 83 Tahun 2003, Sekretariat Pengadilan Pajak (Set PP) dibentuk. Set PP bertugas memberikan pelayanan kesekretariatan dan administrasi bagi Pengadilan Pajak. Dalam melaksanakan tugas, unit ini dipimpin oleh Sekretaris dan dibantu Wakil Sekretaris. Keduanya merangkap jabatan masing-masing sebagai Panitera dan Wakil Panitera Pengadilan Pajak.

Sidang di Tengah Pagebluk

Pada 11 Maret 2020, World Health Organisation (WHO) menetapkan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai pandemi global. Berbagai protokol disiapkan demi mencegah penyebaran virus ini, salah satunya adalah dengan pembatasan sosial. Sebagai pihak yang sehari-hari mempersiapkan tetek bengek gelaran sidang dan berinteraksi dengan banyak orang, pagebluk ini tentu terasa signifikan bagi performa Set PP. Sejak pertengahan Maret sampai awal Juni, layanan dihentikan sementara. “Penghentian sementara layanan ini tetap menjaga hak-hak para pihak tetap terpenuhi,” kata Dendi A. Wibowo, Sekretaris Pengadilan Pajak, secara tertulis. Selama kurun waktu tersebut, para pegawai diminta menuntaskan tugas-tugas yang dapat diselesaikan dari rumah.

Pada pekan kedua Juni, layanan



Gedung Kantor
Sekretariat
Pengadilan
Pajak

Foto
Dok. Set. PP

kembali dibuka dengan menerapkan protokol kewajaran baru. Dalam protokol kewajaran baru, Set PP memberlakukan layanan pengambilan nomor antrian secara daring. Selain itu, Set PP juga menerapkan pembatasan jumlah pengunjung di dalam maupun di luar gedung Pengadilan Pajak, serta layanan sidang daring untuk sidang yang seharusnya dilaksanakan di luar tempat kedudukan (SDTK).

Mekanisme sidang daring, menurut Dendi, merupakan bagian dari rencana jangka panjang sebagai bentuk modernisasi layanan. Namun, dengan adanya wabah, layanan ini justru berjalan lebih gesit dari rencana. "SetPP berinisiasi mengusulkan percepatan implementasi penyelenggaraan sidang secara elektronik kepada pimpinan Pengadilan Pajak namun dengan mempertimbangkan kondisi yang ada," kata Dendi melalui jawaban tertulisnya. Ia juga mengatakan, mekanisme sidang daring ini sementara dilakukan untuk SDTK saja. Sedangkan sidang di tempat kedudukan, saat ini tetap digelar secara luring dengan tetap menerapkan protokol kewajaran baru.

Pria yang mengawali karir di Kementerian Keuangan sejak 1998 ini berharap sidang secara elektronik ini dapat mendorong dan mendukung pelayanan administrasi penyelesaian sengketa pajak yang lebih baik. "Selain itu pengeluaran atau belanja negara menjadi lebih efisien dengan tetap menjaga kualitas layanan dan produktivitas penyelesaian pekerjaan," ujarnya.

Liku Sidang Virtual

Penerapan hal baru, seperti segala yang baru, selalu butuh waktu untuk bisa berjalan seperti harapan. Demikian pula pelaksanaan sidang virtual ini, masih banyak kendala yang perlu disikapi. Kendala jaringan dan kemampuan perangkat tentu tak akan luput dari layanan ini. Namun demikian, Dendi mengatakan, pihaknya terus berupaya



meningkatkan layanan semaksimal mungkin. "Set PP merencanakan untuk dapat menyediakan fasilitas penunjang yang lebih baik, di antaranya perangkat keras dengan spesifikasi yang lebih baik dan aplikasi konferensi video serta jaringan internet yang lebih stabil," ujarnya

Tak sampai di situ, pelaksanaan sidang virtual secara lebih komprehensif saat ini juga masih terkendala dengan perlunya keberadaan berkas-berkas fisik. Terkait hal ini, Dendi mengatakan bahwa pihaknya sedang mempersiapkan sistem yang lebih mutakhir. "SetPP tengah mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi, di mana proses manual

terkait penanganan dokumen fisik tersebut dapat diotomasi dan seluruh dokumen terdigitalisasi," ujarnya.

Ia juga mengatakan, layanan sidang virtual ini hanya sebagian dari upaya Set PP dalam melakukan perbaikan. "Terobosan yang telah dilakukan oleh Set PP untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut hanyalah sebagian dari upaya Set PP dalam melakukan perbaikan dan pembangunan *corporate culture* yang lebih baik sebagaimana diarahkan dan menjadi perhatian dari Pimpinan di Kementerian Keuangan, baik dari Ibu Menkeu, Bapak Wamenkeu, maupun Bapak Sesjen," ujarnya.

PELAYANAN LELANG DIMASA PANDEMI COVID-19



Penjual dapat mengajukan permohonan lelang melalui:

- ★ sarana online

- ★ jasa pengiriman

- ★ disampaikan secara langsung kepada KPKNL

Lelang melalui internet
(lelang.go.id)

- ★ Pembeli hadir secara virtual

- ★ Penjual dapat hadir secara virtual

apabila lelang dilaksanakan di KPKNL

Lelang Konvensional dan e-Konvensional

- ★ Pembeli dan penjual hadir secara fisik

dengan memperhatikan protokol kesehatan

- ★ Dibatasi untuk lelang kayu perhutani dan lelang sukarela

BERKORBAN DEMI MEMASTIKAN

Pelayanan Tetap Berjalan

Teks Dimach Putra Foto Ilustrasi Dok. Biro KLI


Eny Kresnaningsih

Analis Pencairan Dana Senior KPPN Jakarta VII

Bagi Eny Kresnaningsih, pagi hari di bulan April kemarin hanyalah seperti hari-hari biasa. Ia tetap memanaskan mesin mobilnya. Tak seperti kebanyakan orang yang bisa bekerja dari rumah selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di masa pandemi COVID-19, Eny tetap harus melaksanakan tugasnya dengan kehadiran fisik di kantor. Tiap hari ia pulang-pergi menempuh perjalanan 42 km dari rumahnya di Citeureup, Bogor ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VII di Jalan Otto Iskandar Dinata, Jakarta. Mengapa ia harus mempertaruhkan kesehatan hanya demi pekerjaan?

Eny, begitulah perempuan berusia 47 tahun ini akrab dipanggil. Ia bukan tidak mau menjalankan pekerjaannya dari rumah. Namun tanggung jawab profesinya yang menuntutnya harus tetap pergi ke kantor di tengah pandemi COVID-19 ini. Ia tercatat sebagai Analis Pencairan Dana Senior di KPPN Jakarta VII. Meski dalam kondisi terbatas, pelayanan di kantor tersebut harus terus berjalan.

Untuk mengoptimalkan pelayanan di tengah pembatasan sosial tersebut, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) memang telah menerbitkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-267/PB/2020 perihal Pengaturan Pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) ke KPPN Dalam Masa Keadaan Darurat COVID-19. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa satuan kerja yang akan mencairkan anggaran melalui KPPN harus memperhatikan bahwa SPM tersebut sifatnya prioritas. Prioritas utama tentu adalah pembayaran tagihan dalam rangka penanganan keadaan darurat COVID-19. Kedua, pembayaran belanja pegawai dan penghasilan PPNPN. Ketiga, pembayaran belanja bantuan pemerintah dan bantuan sosial. Terakhir, yaitu SPM untuk pembayaran belanja mendesak lainnya.

Kantor tempat Eny mengabdikan melayani beberapa Satuan Kerja (Satker) prioritas, seperti Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial. Jika ia dan rekan kerjanya tak melakukan tugas mereka, hal itu tentu berdampak bagi penanganan COVID-19 secara umum. Tugas Eny dan rekan-rekan termasuk mengawal pencairan dana untuk bantuan sosial dan kesehatan seperti pengadaan alat pelindung diri hingga insentif tenaga kesehatan.

Wajah terdepan pelayanan

Sehari-hari Eny bertugas di *Front Office* (FO) bagian

Konversi KPPN Jakarta VII. Petugas FO Konversi merupakan wajah terdepan KPPN dalam menghadirkan layanan kepada petugas Satker. Tugas kesehariannya adalah menerima pengajuan SPM, koreksi SPM, pendaftaran data kontrak, maupun pendaftaran Rencana Penarikan Dana (RPD) yang dilakukan Satker melalui loket FO Konversi.

Tanggung jawab Eny adalah melakukan pengecekan administratif dan teknis terhadap dokumen yang diajukan berdasarkan peraturan perbendaharaan yang berlaku. Pada tahap selanjutnya, dilakukan unggah Arsip Data Komputer (ADK) pada aplikasi konversi. Hasil kerja Eny tersebut kemudian divalidasi oleh petugas FO validasi.

Di masa awal pemberlakuan PSBB, perempuan yang telah mengabdikan 26 tahun di Kementerian Keuangan ini banyak mendapat komplain dari para Satker. Bagaimana tidak, pada kondisi normal, Satker datang langsung mengajukan proses pencairan di pagi hari. Jika tak ada masalah, dana akan cair di siang atau sore hari. Namun semasa awal pandemi, semua proses harus dilakukan melalui surat elektronik (surel).

Tak jarang berkas yang dilayangkan via surel tersebut kurang lengkap atau salah. Kalau sudah begitu, korespondensi lewat media tersebut cukup menyita waktu. Selain itu, petugas Satker cukup dibuat kelabakan dengan proses pelayanan baru tersebut. Mereka kerap mengeluhkan tidak bisa tahu sejauh mana berkas mereka telah diproses.

Beruntung, tantangan layanan selama awal masa pandemi di KPPN VII tersebut berhasil ditemukan solusinya oleh tim teknologi informasi DJPb dan



Kementerian Keuangan. Tak begitu lama setelah pemberlakuan PSBB, DJPb meluncurkan e-SPM. Aplikasi tersebut memungkinkan pengajuan SPM elektronik secara lebih transparan. Dengan fitur di dalam aplikasi tersebut, kini petugas Satker dapat memantau berkasnya sudah diproses hingga tahapan yang mana.

Adaptasi di masa pandemi

Meski sadar akan tanggung jawab dalam pekerjaan, Ibu dari dua anak ini paham betul ia harus merelakan waktu dan kesempatan berkumpul bersama keluarga di saat mereka melaksanakan himbauan untuk tetap berada di rumah. Tak ayal, putra dan putri Eny pernah melayangkan protes padanya, “Kok gak

kerja di rumah aja sih, Ma?” ucapnya menirukan sang buah hati.

Eny paham bahwa keberatan anak-anaknya itu tak lain sebagai bentuk perhatian dan kekhawatiran mereka. Eny memaklumi jika anak-anaknya dalam kesempatan ini ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga. Tapi di sisi lain, mereka juga sadar bahwa pekerjaan ibunya begitu mulia. Bagaimanapun jika tanpa peran Ibunya, pencairan dana untuk penanganan dan bantuan masyarakat yang terdampak COVID-19 akan terhambat.

Selama masa pemberlakuan PSBB, ia bersyukur dapat memangkas waktu tempuh perjalanan pulang dan pergi dari rumah ke kantor. Namun, rasa was-was justru dirasakan Eny saat ini, ketika memasuki masa peralihan PSBB. Kini, ia dan jutaan warga megapolitan Jakarta kembali harus merasakan kemacetan jalanan ibukota.

“Belum kalau nanti dibikin ganjil-genap lagi,” serunya setengah tersenyum. Jika kebijakan tersebut kembali diberlakukan, mau tak mau ia harus berselang-seling antara menggunakan kendaraan pribadi dan moda transportasi publik lain yang tersedia. Rasa khawatir karena risiko terpapar kembali muncul jika nanti ia terpaksa harus menggunakan transportasi publik. Namun, ia sendiri meyakinkan hatinya bahwa ia akan tetap menajalankan amanah pekerjaan dengan meminta perlindungan sang Maha Esa.

Bersiap menyambut norma baru

Eny menghela nafas. Pikirannya melayang ke masa-masa sebelum pandemi ini menjangkit seluruh dunia. Ia merindukan normal lama. Segalanya tampak begitu mudah dan menyenangkan untuk dilakukan. Sayangnya, hal tersebut baru bisa kita rasakan kini, setelah segala sesuatu semakin dibatasi.

Perempuan kelahiran Klaten ini sangat merindukan Minggu paginya. Hari libur tersebut biasa ia habiskan dengan suami dengan *jogging* di GOR Pakansari, Cibinong. Setelah cukup berkeringat, mereka berjalan santai menikmati keramaian pasar tumpah di area GOR tersebut. Sesudahnya, sepiring nasi pecel di salah satu penjual lesehan di sana kerap menjadi penutup aktifitas fisiknya.

Sudah tiga bulan terakhir cara Eny *refreshing* di akhir pekan itu terhenti sejak ditutupnya GOR karena PSBB. Sungguh sebuah kegiatan sederhana yang kini menjadi kemewahan. Ia berharap kondisi di negeri ini bisa berangsur membaik seiring berjalannya waktu meski dengan tatanan normal baru. Dengan begitu semua orang tak perlu was-was dan bisa *enjoy* menjalankan tugas. Ia hanya punya satu harapan sederhana, agar semua bisa tetap sehat. “Buat saya yang penting sehat, bisa terus *ndampingi* anak-anak lulus kuliah sampai sukses semua,” pungkas Eny.

New Normal di Tempat Kerja, Seperti Apa?

Teks dr. Nur Zahratul Jannah | Foto Denny Aulia

Ketika mendengar kata *new normal* atau kenormalan baru, kita langsung teringat Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), cuci tangan, serta etika batuk yang sudah sering dipromosikan oleh pemerintah. Pengetahuan tersebut menuntut kedisiplinan dan konsistensi. Dua hal yang tidak sederhana kedengarannya. Kebiasaan baru bisa terasa lebih berat hingga kita merasa jenuh lalu abai. Di sinilah diperlukan peran rekan kerja untuk saling mengingatkan.

Kenormalan baru bukan sekedar menerapkan protokol, namun juga kepedulian terhadap rekan kerja. Saat di kantor, kita bekerja di ruangan yang sama, menggunakan fasilitas yang sama, dan pendingin udara yang juga sama dengan ventilasi udara yang minim. Saat teman kita sakit, dulu mungkin biasanya kita cuek, tetapi di kondisi pandemi ini kita sepatutnya juga turut khawatir. Alih-alih memberikan stigma negatif, dukungan, kepedulian, sikap positif, dan kepekaan kepada rekan kerja yang sedang sakit adalah hal yang harus kita tumbuhkan.

Sebelum masuk bekerja ke kantor, selalu lakukan *self assesment* dengan jujur, bukan hanya demi kesehatan diri sendiri tetapi juga orang-orang di sekitar kita. Jika tergolong berisiko tinggi, maka hendaknya jangan

memaksakan diri untuk masuk kerja karena kelalaian kita berpotensi menularkan penyakit ke teman kantor bahkan keluarga mereka. Demikian halnya jika kita sehat, sepatutnya harus kita syukuri dengan cara lebih produktif dalam bekerja.

Sebuah jurnal menunjukkan orang yang aktif, secara fisik lebih baik imunitasnya daripada yang tidak cukup aktivitas fisiknya. Menjaga badan tetap produktif akan menumbuhkan pola pikir positif dalam diri dan meningkatkan imunitas tubuh. Jadi, jika kita sehat berdasarkan *self assesment*, jangan enggan jika Anda memang harus masuk kantor tentunya dengan mengikuti protokol kesehatan.

Segala kebiasaan baru ini akan berat dan canggung pada awalnya. Siapa yang nyaman memakai masker setiap saat di dalam kantor, membersihkan meja kerja dengan disinfektan sebelum dan sesudah selesai kerja, mengingatkan rekan kerja saat mereka lupa menutup mulut ketika bersin, rajin mencuci tangan? Semua itu pasti tidak mudah. Namun jika dilakukan bersama-sama maka akan lebih menyenangkan. Pakar menyatakan bahwa pandemi ini mungkin akan berjalan dalam waktu yang tidak singkat. Kitalah yang harus mampu untuk adaptif terhadap tantangan yang ada.

PELAJARAN DARI PANDEMI UNTUK

Potensi Pertumbuhan Ekonomi

Teks Ariza Ayu Ramadhani, pegawai Biro KLI Sekretariat Jenderal

Sebelum COVID-19, sejarah mencatat kemunculan empat pandemi selama abad ke-21 yaitu N1H1 atau flu burung di tahun 2009, SARS di tahun 2002, MERS di tahun 2012 dan Ebola di tahun 2013 – 2014. Dari kelima pandemi tersebut, tingkat fatalitas COVID-19 memang bukan yang tertinggi, tapi yang paling mudah menular dari manusia ke manusia sehingga penyebarannya sangat cepat. Dari data WHO, sejak Desember 2019 sampai Juni 2020 tercatat 7,69 juta kasus COVID-19 di seluruh dunia.

Negara-negara yang terjangkit wabah COVID-19 mulanya mengalami krisis kesehatan yang selanjutnya menjalar ke krisis ekonomi dan berpotensi menuju ke krisis sektor keuangan. Adanya wabah yang sangat mudah menular dari manusia ke manusia menyebabkan negara harus membuat kebijakan pembatasan aktivitas fisik seperti bekerja, sekolah, dan rekreasi yang berarti juga menghentikan aktivitas ekonomi. Di Indonesia, pembatasan fisik ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi di kuartal I/2020 hanya sebesar 2,97%. Sebagai perbandingan, pertumbuhan

ekonomi Indonesia di kuartal yang sama di tahun 2019 adalah sebesar 5,19%. Hantaman krisis diprediksi paling berat terjadi di kuartal kedua dengan pertumbuhan ekonomi di bawah nol. Studi yang dilakukan Simon Wren-Lewis, Ekonom Universitas Oxford, menunjukkan bahwa dampak terbesar dari pandemi terhadap ekonomi diprediksi terjadi selama 3 sampai 6 bulan dengan penurunan pertumbuhan ekonomi kurang lebih sebesar lima persen (5%). Setelah periode tersebut, pertumbuhan ekonomi akan kembali melaju (*bounce-back*). Oleh karena itu, di samping terus menangani COVID-19 baik dari sisi kesehatan maupun dampaknya terhadap masyarakat, kita dapat bersiap untuk memetik pelajaran dari COVID-19 ini untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Human Capital

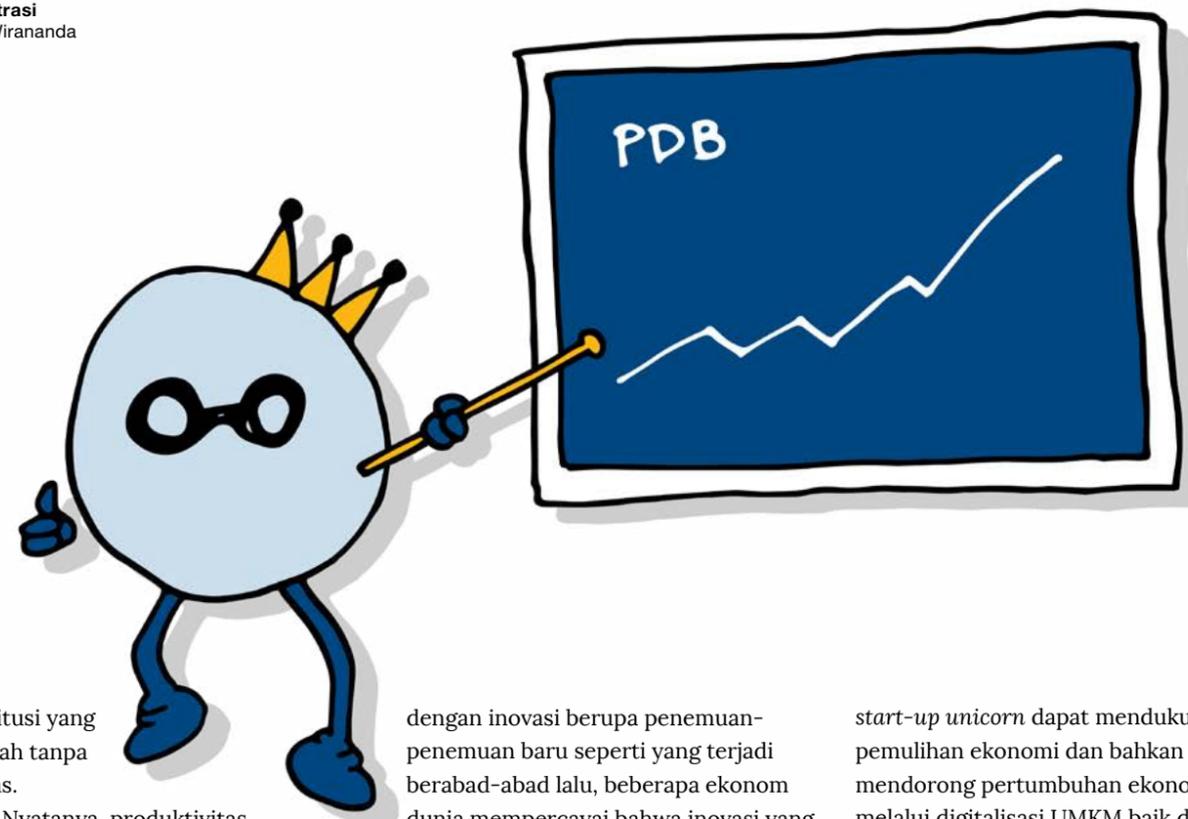
Studi mengenai teori Pertumbuhan Ekonomi *Endogenous* menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara lebih ditentukan oleh sumber daya manusia (*human capital*) dan inovasi yang dilakukan di dalam sebuah sistem perekonomian melalui *research and development (R&D)*. Teori ini

pertama kali muncul di tahun 1962 yang terus menjadi perhatian para ekonom hingga saat ini.

Sebelum pandemi COVID-19, berbagai universitas terbaik di dunia telah banyak membuka kelas daring. Kita juga mengenal platform belajar seperti coursera atau udemy untuk meningkatkan kemampuan melalui kelas daring baik berbayar maupun tidak berbayar. Kelas-kelas ini memberikan kesempatan kepada pesertanya untuk belajar dari para profesor atau ahli terkemuka dari universitas atau institusi terbaik di dunia dengan harapan memperkecil gap ilmu pengetahuan.

Di masa pandemi COVID-19, adanya kebijakan pembatasan fisik memaksa sekolah-sekolah untuk menyelenggarakan pembelajaran daring, kantor-kantor untuk tetap beroperasi dengan pegawai yang bekerja dari rumah, dan komunikasi yang dilakukan tanpa kegiatan tatap muka. Kondisi ini memaksa banyak orang untuk beradaptasi dengan cepat, menyamankan diri dengan pertemuan-pertemuan virtual termasuk webinar, *briefing*, dan *training* yang sangat berdampak pada akselerasi *sharing knowledge* antar manusia dan antar

Ilustrasi
A. Wirananda



institusi yang seolah tanpa batas.

Nyatanya, produktivitas organisasi tetap terjaga atau bahkan meningkat dengan adanya *work from home (WFH)* ini. CEO Twitter, misalnya, memberlakukan WFH selama-lamanya karena kinerja perusahaannya tidak terganggu dengan keterpaksaan WFH selama pandemi.

Kondisi ini seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mengurangi kesenjangan informasi dan kesempatan, misalnya antara masyarakat perkotaan-perdesaan. Program peningkatan kualitas SDM perdesaan misalnya melalui dana desa, dapat difokuskan untuk memberikan edukasi mengenai pelatihan-pelatihan daring yang bisa diakses. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di tahun-tahun mendatang.

Inovasi

Inovasi dapat tercipta melalui sumber daya manusia yang berkualitas, seperti yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya, dan juga melalui perkembangan teknologi. Berbeda

dengan inovasi berupa penemuan-penemuan baru seperti yang terjadi berabad-abad lalu, beberapa ekonom dunia mempercayai bahwa inovasi yang terjadi saat ini dapat disebut sebagai "*creative destruction*" yang berarti melakukan perbaikan dan peningkatan atas hal-hal yang sebenarnya sudah ada. Argumentasi ini pertama kali dicetuskan oleh ekonom Austria, Joseph Schumpeter (1942) dan diperbaharui oleh banyak ekonom hingga saat ini.

Di Indonesia, 60 persen tenaga kerja diserap oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Di masa pandemi ini, UMKM atau SME termasuk golongan yang paling terdampak COVID-19. Menurut beberapa studi, UMKM yang memanfaatkan teknologi dalam usahanya, terbukti lebih kuat dalam menghadapi guncangan eksternal. Hal ini mungkin terjadi karena penggunaan teknologi dapat berarti administrasi yang lebih tertata, pembukuan yang tertib, pemasaran melalui *marketplace*, sehingga memungkinkan usaha tersebut tetap bertahan di masa pembatasan fisik seperti saat ini.

Setelah pandemi berakhir, perusahaan-perusahaan besar di bidang teknologi informasi dan juga

start-up unicorn dapat mendukung pemulihan ekonomi dan bahkan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui digitalisasi UMKM baik dengan memberikan dukungan berupa modal, infrastruktur atau berbagi keahlian yang spesifik untuk tujuan tersebut. Melalui UMKM yang kuat, angka pengangguran berkurang, penerimaan negara bertambah, sehingga pertumbuhan ekonomi juga meningkat.

Untuk menjadikan *human capital* dan inovasi sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia, diperlukan poin ketiga, yaitu perubahan pola pikir. Pola pikir bahwa akses terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi harus dibuka untuk semua golongan masyarakat. Upaya ini perlu mendapatkan perhatian baik dari regulator (pemerintah) maupun dari universitas-universitas terbaik dan juga perusahaan-perusahaan besar agar ketimpangan pendidikan dan keahlian tidak semakin melebar di Indonesia.

*Tulisan ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan/perspektif institusi tempat penulis bekerja.

Tatkala Konektivitas Tak Terbatas

Foto dok. Kementerian PUPR | Teks Resha Aditya Pratama

Jalur Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) mulai tersambung. JTTS adalah jaringan jalan tol sepanjang 2.818 km yang direncanakan menghubungkan dari Lampung hingga Aceh. Pada tahun 2019 lalu, Presiden Joko Widodo telah meresmikan salah satu Proyek Strategis Nasional yang pembebasan lahannya di danai oleh salah satu Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yaitu JTTS ruas Bakauheni - Terbanggi Besar dan ruas Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung. Kedua ruas tol ini menjadi sejarah sebagai tol terpanjang pertama dan kedua di Indonesia dengan panjang mencapai 140,9 km dan 189,2 km. Pembebasan

lahan dan pembangunan dua ruas tol yang memakan waktu 4 tahun ini menghabiskan biaya sebesar Rp38,5 triliun. Ruas ini menjadi jalan akses utama dari dan ke pelabuhan Bakauheni. Mengingat Pelabuhan Bakauheni adalah salah satu pelabuhan utama yang menghubungkan pulau Jawa dengan pulau Sumatera, maka keberadaan ruas ini dapat secara signifikan mempercepat distribusi barang dan orang yang tiba di Sumatera melalui pelabuhan tersebut. Diharapkan jalan tol tersebut tidak hanya mempermudah konektivitas tetapi juga dapat memberikan dampak ekonomi maupun sosial bagi masyarakat sekitar.

Panjang JTTS

2.818 km

Panjang Ruas Terbanggi Besar - Kayu Agung

189,2 km

Panjang Ruas Bakauheni - Terbanggi Besar

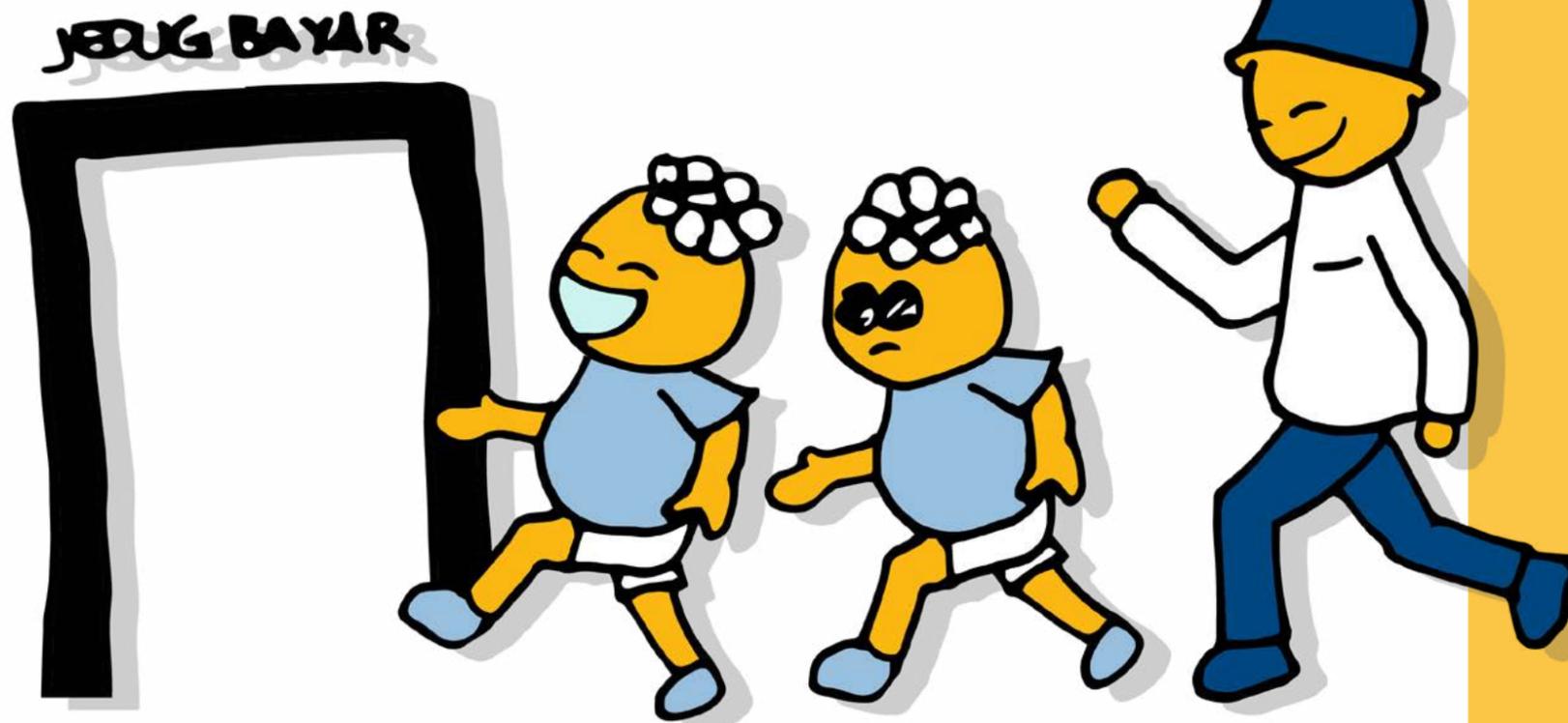
140,9 km

Total Biaya dua ruas

Rp38,5 T

Excess Profit Tax sebagai Solusi

Teks Rinaldi,
Pegawai Direktorat Jenderal Pajak



Ilustrasi
A. Wirananda

Pada 20 Mei 2020, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) baru saja merilis realisasi APBN 2020 hingga 30 April 2020. Jika dilihat pada rilis tersebut, realisasi terlihat cukup bagus, defisit APBN sebesar Rp74,47 triliun, lebih rendah dibandingkan dengan realisasi defisit

pada periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp100,3 triliun.

Namun, jika kita mengkaji lebih dalam dari realisasi defisit ini, maka terlihat penyebab “rendahnya” angka defisit ini adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang pertumbuhannya mencapai 21,70 persen (yoy). Salah satu sub-PNBP

yaitu pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan tumbuh 799.504,33 persen (yoy). Inilah salah satu faktor yang mendorong capaian pertumbuhan penerimaan negara menjadi 3,23 persen (yoy) sehingga meng-off set realisasi belanja negara yang realisasinya hampir sama dengan capaian tahun lalu.

Bagaimana dengan penerimaan pajak? jawabannya adalah “babak belur”, hanya PPN/PPnBM dan PBB (sektor P3) yang pertumbuhannya positif, lainnya negatif, bahkan penerimaan PPh Badan yang seharusnya mencapai *peak*-nya pada bulan April (jatuh tempo pelaporan SPT PPh Badan pada 30 April), pertumbuhan penerimaannya -15,23 persen.

Kebijakan pajak yang telah diambil pemerintah Indonesia

Kemenkeu menjelaskan bahwa pertumbuhan penerimaan PPN/PPnBM yang positif ini ditopang oleh PPN Dalam Negeri (PPN DN) yang masih tumbuh 10,09 persen, hal ini mengindikasikan masih kuatnya transaksi penyerahan barang dan jasa penerimaan. Namun situasi ini bisa berubah mengkhawatirkan karena penerimaan PPN pada bulan-bulan berikutnya hampir dapat dipastikan menurun jauh dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah. Sementara itu, pemberian insentif pajak terus dioptimalkan, misalnya melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang dialokasikan sebesar Rp123,01 triliun. Jika penerimaan negara terus menurun, sementara kebutuhan belanja negara terus meningkat, bisa dipastikan angka defisit akan melonjak drastis.

Kembali ke kebijakan insentif pajak, pemerintah tentu telah memperhitungkan dampak dari insentif

ini terhadap penerimaan negara, namun permasalahannya adalah apakah insentif ini benar-benar bisa dimanfaatkan oleh Wajib Pajak yang terdampak COVID-19? Apakah insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) menjamin pekerja tidak di PHK? Apakah insentif restitusi PPN dipercepat menjamin usaha mereka tetap berkesinambungan?

Terkait hal ini, menarik untuk dilihat pendapat dua pakar ekonomi dari Universitas California yaitu Saez dan Zucman. Mereka mengkritisi kebijakan yang diambil oleh pemerintah Amerika dalam menghadapi COVID-19. Krisis yang dihadapi dunia saat ini berbeda dengan krisis pada tahun 2008-2009. Kala itu bencana yang dihadapi adalah bencana yang secara langsung menyebabkan perusahaan mereka hancur, yaitu bencana krisis keuangan akibat bangkrutnya Lehman Brothers. Namun bencana yang terjadi saat ini adalah bencana kesehatan, yang mungkin tidak semua perusahaan terkena dampak langsung dari bencana ini. Banyak juga perusahaan yang malah meraup untung dari COVID-19 ini. Di saat banyak pabrik menutup usaha mereka, penjualan Amazon justru meningkat, bisnis Cloud meningkat, jumlah akses ke Facebook juga meningkat. Belum lagi jika melihat aplikasi webinar yang marak digunakan saat para pekerja “bekerja dari rumah” di masa pandemi ini.

Excess Profit Tax sebagai solusi kebijakan pajak di tengah COVID-19

Melihat tidak semua perusahaan terkena dampak negatif dari COVID-19 ini, maka mereka mengusulkan agar pemerintah bisa mengkaji penerapan “Excess Profit Tax (EPT)”. EPT adalah suatu pajak yang dikenakan kepada perusahaan yang mendapatkan keuntungan (profit) lebih dari suatu margin tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagai contoh, pada

tahun 1918, saat terjadi resesi ekonomi pasca Perang Dunia I, Amerika menerapkan EPT bagi perusahaan yang mencetak *Return on Invested Capital (ROC)* atau pengembalian investasi modal di atas 8 persen. Tarif EPT yang dikenakan pada saat itu progresif antara 20 hingga 60 persen. Kebijakan yang sama juga diterapkan pada tahun 1940, saat Perang Dunia II dan saat Perang Korea. Kebijakan pengenaan EPT ini mempunyai tujuan yang sama yaitu memastikan bahwa tidak ada pihak yang mengambil untung secara berlebihan pada saat pihak lain merasakan penderitaan.

Apakah hal ini bisa diterapkan di Indonesia? Untuk menjawabnya, ada baiknya kita kembali lagi ke realisasi APBN 2020 sampai dengan April 2020. Dari segi realisasi penerimaan pajak sektoral non-Migas, non-PBB, dan non-PPh DTP, dapat dilihat bahwa ada beberapa sektor yang mengalami pertumbuhan, seperti industri pengolahan serta jasa keuangan dan asuransi, yang masing-masing tumbuh 4,68 persen dan 8,16 persen. Kedua sektor ini menopang 45,3 persen dari total realisasi penerimaan pajak. Statistik ini menunjukkan bahwa tidak semua sektor terkena dampak negatif COVID-19 (walaupun masih diperlukan analisis mendalam terhadap hal ini, karena Maret dan April merupakan masa awal pandemi). Oleh sebab itu, menurut Penulis, kebijakan *Excess Profit Tax* layak dipertimbangkan sebagai suatu solusi kebijakan fiskal mengatasi dampak ekonomi yang disebabkan oleh COVID-19.

Kebijakan ini terkesan tidak lazim diterapkan di negara manapun termasuk Amerika sekalipun apalagi di Indonesia, namun perlu diingat bahwa seperti yang dikatakan Sri Mulyani: “*Extraordinary situation needs extraordinary policy*”, dan kita, Indonesia, sedang menghadapi kondisi *extraordinary* tersebut.

*Tulisan ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan/perspektif institusi tempat penulis bekerja.

Dari Desa, Karena Desa, Untuk Desa

Teks CS. Purwowidhu

Indonesia memiliki 74.953 desa dengan beragam potensi dan kekayaan, seperti pertanian, perikanan, peternakan, kerajinan, dan pariwisata yang dikemas sesuai kearifan lokal masing-masing desa. Namun, di balik ragam potensi dan kekayaan desa tersebut, rantai kemiskinan masih erat membelenggu desa. Tak bisa ditampik, hal ini menjadi salah satu faktor anak-anak muda di desa beralih ke kota. Tidak terbayangkan apabila kondisi tersebut terus berlangsung, sementara keberlanjutan sumber daya desa dibutuhkan untuk menyokong keberlangsungan kehidupan kota.

Adalah seorang putra Sampang, Madura, Dodik P. Wijaya atau kerap disapa Dodik, yang memilih untuk tetap membangun Indonesia dari desa, sekembalinya dari menempuh beasiswa S2 di Amerika, yang diperolehnya melalui pendanaan LPDP jalur Afirmasi Bidikmisi Berprestasi. Di tahun 2018, sepulangnya ke tanah air, lulusan Master Hukum dari Michigan State University (MSU) tersebut kembali ke Madura dan menjadi dosen di almamaternya, Universitas Trunojoyo Madura (UTM). Ia aktif di beberapa penelitian dan berfokus pada hukum internasional. Di akhir 2018, pria yang mencintai pendidikan ini berhasil lulus seleksi beasiswa S3 LPDP. Semula direncanakan, akhir tahun 2019 ia kembali berangkat ke Amerika. Namun takdir berkata lain, rencana tersebut ditunda sementara waktu karena ia harus menunaikan amanah sebagai Staf Khusus Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Bidang Mitra Luar Negeri dan Mitra Perguruan Tinggi.

Dodik dan desa

Sebagai anak desa, Dodik sangat bersyukur atas kesempatan yang dipercayakan oleh Menteri Desa PDTT kepadanya untuk berkontribusi membantu penanganan permasalahan desa. Pria yang lahir 28 tahun silam tersebut bertugas menjembatani agar program Kementerian Desa bisa secara global terbaca jelas oleh dunia. “Semua arahan Pak Menteri saya aplikasikan dalam bentuk kajian akademik, yang selanjutnya saya buat suatu program kalau memang program itu belum ada,” ungkap Peraih *Platinum Certified Certificate* pada *Annual Leadership Award* MSU tahun 2017 itu.

Menurut Dodik, diperlukan *quadruple helix* atau sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, aparatur desa dan juga pebisnis di desa untuk memberdayakan dan memajukan desa. “Sinergitas menjadi penting karena desa memiliki keterbatasan untuk bisa langsung mengakses ke pemerintah pusat,” ujarnya. Contoh riil aplikasinya adalah skema padat karya tunai di desa.

Pemuda yang sering membantu anak tidak mampu untuk bisa melanjutkan pendidikan tinggi tersebut juga menjelaskan ada dua isu utama yang hendak dibenahi di desa, yakni kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) desa dan transformasi ekonomi. Fokus SDM bertujuan membangun SDM unggul mulai

dari pendamping desa, masyarakat desa, dan aparatur desa. “Kita sedang mendesain *capacity building* untuk para pendamping desa,” kata Dodik. Untuk membangun pendidikan di desa, kerja sama dengan Kemendikbud juga dirintis kampus merdeka untuk desa, baik PTN maupun PTS. Dodik mencontohkan, apabila ada 5 anak yang berasal dari desa bisa masuk kampus merdeka dengan kapabilitas mereka yang beragam, pada akhirnya mereka dapat membantu aparatur desa sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Minimnya kepala desa atau aparatur desa yang bergelar sarjana juga menjadi masalah SDM di desa. “Kita sedang melakukan upaya agar para aparatur desa dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat sarjana,” ucap pria yang mengidolakan BJ. Habibie ini.

Pemberdayaan SDM juga berkaitan dengan kerukunan umat beragama. Dodik turut serta membantu Kemendes PDTT untuk mengimplementasikan Forum Pemuka Agama untuk Desa sebagai upaya menangani radikalisme di desa, sesuai arahan Menteri Desa PDTT. “Kita berharap desa ini tidak dikembangkan oleh satu komunitas saja. Kita ingin *create* bagaimana pemerintah hadir dalam kebhinekaan tunggal ika tetapi dalam skop desa,” pungkask pria yang aktif di Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) tersebut.

Di samping pembenahan SDM, Dodik menerangkan, transformasi ekonomi juga perlu dilakukan. Ini berkaitan dengan upaya pemberdayaan kapital di desa. Memutus mata rantai antara petani dan *broker* penting dilakukan agar petani



Dodik P. Wijaya, Staf Khusus Menteri Desa PDTT.

Foto Dok. Pribadi



Gedung Danadyaksa Cikini
Jl. Cikini Raya no. 91 A-D Menteng
Telp/Faks. (021) 3846474
E-mail. lpdp@depkeu.go.id
Twitter/Instagram. @LPDP_RI
Facebook. LPDP Kementerian Keuangan RI
Youtube. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP RI

sejahtera. “Beberapa bulan lalu kita sudah ekspor kelapa ke luar negeri,” kata Dodik mencontohkan bagaimana hasil panen di desa bisa langsung diekspor tanpa melewati *broker*. Sementara, untuk membantu pemberdayaan desa, salah satu upaya yang ia lakukan yakni dengan membangun komunikasi dan kerja sama Voice of America (VOA) untuk memublikasikan desa-desa di Indonesia. “Dengan publikasi secara global diharapkan dapat membantu menjembatani desa untuk memasarkan hasil buminya ke negara-negara yang membutuhkan,” ucapnya. Dodik juga sedang merintis kerja sama Kemendes PDTT dengan almamaternya, MSU, untuk membangun kapasitas dan pertanian desa.

Keterbatasan bukan halangan

Terlahir dalam keluarga tidak mampu,

dengan Bapak berprofesi sebagai supir truk dan Ibu sebagai penjual nasi, tidak menghalangi Dodik dalam berjuang mengubah trah keluarga melalui pendidikan, yang sejak SMP diperolehnya dengan beasiswa. “Saya bersyukur menjadi warga negara yang bebas biaya sekolah,” ucap anak dari penerima penghargaan Orang Tua Hebat versi Kemendikbud tahun 2019 tersebut.

Bukan hanya cakap secara akademis, pemuda yang aktif mengampanyekan pendidikan di desa sejak tahun 2013 itu juga memiliki kemampuan mumpuni dalam berorganisasi. Pernah suatu kali di masa luang tatkala Dodik harus menunda masuk perguruan tinggi selama 1 tahun karena kurang biaya, ia membuat agenda yang sangat besar di desanya yang selama ini belum pernah ada yakni jambore ranting yang diikuti

oleh 15 ribu orang. Tidak dinyana kegiatan ini menjadi titik balik kehidupan Dodik. “Ibu saya kan penjual nasi, entah kenapa para peserta jambore beli nasinya ke rumah semua,” kenang pria yang aktif di lebih dari 20 organisasi ini dan pernah mengetuai lebih dari setengahnya. Hasil berjualan nasi sang ibu yang setelah dikumpulkan sebesar Rp3,5 juta berhasil menghantarkan Dodik mendaftar kuliah di UTM. Selanjutnya Dodik menuntaskan jenjang S1 tersebut dengan beasiswa bidikmisi dari pemerintah.

Saat menempuh S2 di Amerika, Dodik tidak meninggalkan kegemaran berorganisasi, mulai dari aktif di NGO internasional hingga menjadi ketua pengajian di Asosiasi Muslim Indonesia di Michigan dilakoninya. Tidur dua hingga 3 jam per hari menjadi makanan sehari-hari Dodik yang harus berjibaku membagi waktunya untuk istri, kegiatan kampus, dan kegiatan organisasi lainnya. Keuletan salah satu pendiri organisasi Permadani Diksi Nasional tersebut berbuah manis. Masa studi S2 yang seharusnya ditempuh selama 2 tahun bisa diselesaikan hanya dalam jangka 1,5 tahun dengan hasil memuaskan, ditambah lagi dengan kelahiran buah hati pertama Dodik dan istrinya di US kala itu.

Dodik berpesan kepada anak muda di Indonesia untuk tidak hanya memikirkan diri sendiri tapi juga memikirkan orang lain. “Dari sekarang ikutlah organisasi, baktikan diri Anda kepada rakyat, kepada desa,” lugasnya. Ia berharap generasi muda Indonesia dapat menjadi yang terbaik dalam setiap langkah kehidupan yang dijalani karena apa yang dilakukan saat ini adalah investasi untuk masa depan. “Jangan berfokus hanya kepada mencari gelar pendidikan semata, karena Allah akan mengangkat derajat orang karena ilmunya, bukan karena gelar pendidikannya. Jangan pernah takut miskin mencari ilmu, karena Allah akan selalu membukakan pintu rezeki kepada mereka yang cinta mencari ilmu,” pungkask Dodik.

BERAKHIR PEKAN KE MALIN DEMAN

Teks dan Foto
Tommy Rizki, pegawai KPPN Mukomuko

Malin Deman, mungkin masih sangat asing bagi masyarakat Indonesia. Terletak sekitar 180 kilometer dari Ibukota Provinsi Bengkulu, Malin Deman adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Mukomuko. Di daerah yang tak banyak diketahui turis ini, lahir legenda Malin Deman. Kisahnya tak jauh berbeda dengan legenda Jaka Tarub di Jawa. Tak hanya itu, konon Si Pahit Lidah yang merupakan tokoh legenda lain dari provinsi tetangga juga pernah melintasi daerah ini.

Tak perlu waktu lama bagi saya dan rekan-rekan untuk memutuskan mengunjungi situs ini.

Berangkat di pagi hari dari Mukomuko, kami menuju ke Desa Air Merah di Kecamatan Malin Deman. Setelah menempuh sekitar tiga jam perjalanan dengan kondisi jalan yang cukup baik, kami tiba di Desa Air Merah. Untuk menuju ke lokasi situs-situs legenda tersebut, kami menggunakan perahu kayu untuk menyusuri aliran Sungai Batang Arau untuk tiba di lokasi.

Perjalanan menyusuri sungai sangatlah menakutkan. Seolah menyusuri Sungai Amazon versi mini. Air sungai yang tenang berwarna hijau jernih menandakan sungai ini dalam. Tetapi pada beberapa titik dasar sungai terlihat karena airnya sangat jernih. Sepanjang kanan dan kiri sungai masih terjaga kelestariannya.

Terpesona ragam flora dan fauna Pepohonan besar yang diantaranya merupakan pohon buah seperti durian, matoa, rambutan hutan tampak terlihat. Sayangnya, pohonnya sedang tidak berbuah. Menurut penduduk lokal, jika sedang berbuah maka siapa pun bebas untuk memetik karena berada dalam kawasan hutan, tidak ada pemiliknya. Beberapa kali kami berpapasan dengan penduduk yang berlalu lalang membawa hasil kebun seperti sawit, pisang, dan buah lainnya dari hulu sungai.

Kami sangat menikmati pemandangan indah nan segar disepanjang perjalanan. Burung-burung yang beterbangan, rombongan kerbau yang asyik mandi serta mengamati ikan-ikan yang berenang disekitar perahu kami. Beberapa kali melewati bagian dangkal sungai yang berarus membuat perahu kecil kami harus beberapa kali kandas, dan cukup menantang adrenalin karena bergoyang keras dan seakan akan terbalik.

Legenda di balik batu

Sekitar 30 menit kemudian kami tiba di situs pertama, yaitu situs Batu Gajah, Harimau, dan Badak. Konon, dahulu tiga binatang itu sedang berkelahi di tengah sungai. Kemudian si Pahit Lidah lewat di dekat situ dan mengutuk ketiga hewan tersebut menjadi batu. Dulu ketiga batu tersebut dapat dilihat kemiripannya. Tetapi sekarang mulai tidak terlihat akibat terkikis oleh air sungai, dan juga perubahan alur sungai yang membuat ketiga batu tersebut kini tidak berada di tengah sungai lagi.

Bagi yang pandai berenang dan suka memacu adrenalin, melompat dari batu-batu tersebut menjadi hal yang wajib untuk dilakukan. Air jernih dengan arus yang aman cocok untuk berenang. Jika takut, cukup basah-basahan bermain air di pinggir sungai.

Kami agak kurang beruntung saat itu, karena musim kemarau perahu kami tidak bisa bergerak lebih jauh lagi. Konon, bagian hulu sungai itu merupakan tempat mandi para bidadari. Di tempat itulah si Malin Deman mencuri selendang salah satu dari bidadari tersebut yang kemudian dinikahnya. Pada saat pesta pernikahan, bidadari tersebut menari dan diiringi keenam saudari lainnya dan terciptalah Tari Gandai yang merupakan tarian khas dari Mukomuko, Bengkulu.

Artikel dalam rubrik ini terbuka untuk umum. Kirimkan naskahmu ke alamat email mediakeuangan@kemenkeu.go.id sertakan nama, alamat, dan no telepon.

PERJANJIAN PRANIKAH

Baru-baru ini, netizen sedang dihebohkan oleh salah satu drama Korea yang bercerita tentang rumah tangga yang hancur karena suaminya direbut oleh wanita lain. Sebenarnya, hal semacam ini sudah banyak terjadi di sekitar kita. Hanya saja, seringkali masalah ini masih dianggap terlalu tabu untuk dibicarakan. Padahal, dari setiap kejadian ada hal penting yang dapat kita pelajari termasuk dari segi pembelajaran finansial.

Tentu saja setiap pasangan yang menikah ingin membangun keluarga yang mapan secara finansial, aman, sejahtera, dan bahagia tanpa dihantui oleh kecurigaan dan perasaan negatif. Tetapi, kita juga harus menyadari bahwa faktanya terkadang tujuan yang kita inginkan seringkali tidak sesuai harapan. Oleh karenanya, perjanjian pra nikah perlu dipertimbangkan untuk dilakukan.

Yuk, tanpa acara *baper* dan emosi, mari kita bersikap realistis dan berbicara mengenai perjanjian pra nikah ini. Perjanjian pra nikah yang *basic* biasanya menyatakan aset mana yang dianggap terpisah kepemilikannya dan yang dianggap menjadi harta bersama. Jika terjadi perpisahan,

maka pasangan akan mengetahui dengan jelas bagaimana cara pembagian untuk harta bersama dan berapa tunjangan hidup yang harus dibayarkan secara rutin termasuk jangka waktunya.

Saat ini, klausul perjanjian pra nikah sudah umum mencantumkan "lifestyle clauses" di mana di dalamnya terdapat klausul *infidelity*, yaitu klausul yang membahas kesepakatan jika salah satu pasangan berselingkuh dan konsekuensi finansial apa yang harus dibayarkan kepada pihak yang dirugikan. Perjanjian pra nikah ini paling tidak akan mengerem ataupun menghindari risiko yang terjadi jika suatu saat kondisi keuangan keluarga menjadi semakin mapan dan mulai bermunculan berbagai jenis godaan.

Lalu bagaimana jika pasangan sudah terlanjur tidak memiliki perjanjian pra nikah atau baru mau menikah tetapi memutuskan untuk tidak membuat perjanjian karena khawatir

menyinggung perasaan pasangan? Kamu harus membuat semua aset bisa diakses oleh kedua belah pihak. Sebagai contoh, buatlah rekening tabungan QQ atau kartu kredit dengan *limit* gabungan. Dengan adanya *joint account* ini, akan diketahui secara persis pendapatan dan juga pengeluaran masing-masing sehingga alur kas bisa akuntabel dan dapat ditelusuri dengan mudah. Bagaimanapun, keterbukaan finansial adalah salah satu fondasi wajib menuju kesejahteraan finansial sebuah keluarga.

Prinsip "uangku uangmu, uangmu uangku" jelas tidak bisa diterapkan ketika kita sudah menikah. Konsekuensi dari prinsip ini terlalu besar. Setiap pasangan perlu mengetahui dengan pasti aset maupun utang yang dimiliki berikut juga penghasilan dan pengeluaran agar dapat terhindar dari risiko yang tidak diinginkan di kemudian hari. Selamat berkomunikasi dengan pasanganmu!



Foto Resha Aditya P

Mas Praim

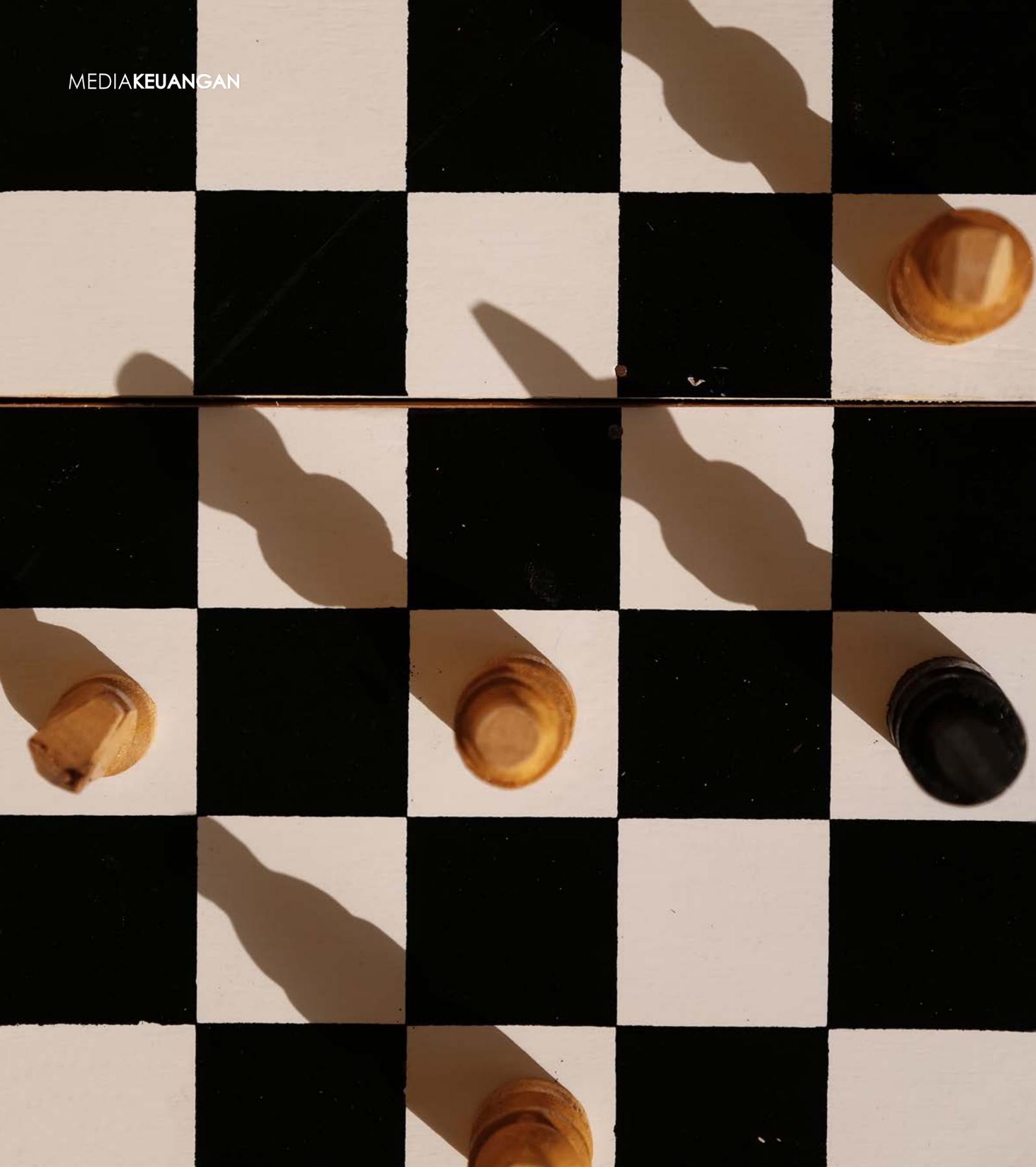
"Kenormalan Baru"



Cerita : Yani Kurnia A. Gambar : Ditto Novenska



MEDIAKEUANGAN



HARI CATUR INTERNASIONAL
20 JULI 2020

Foto
Anas Nur Huda